



NALAR ARIF BAKTIKU BANGSA

2018

**Dr. H. Dadang Solihin, S.E., M.A.**  
**Agustinus Hariyana, S.S., M.Si.**  
**Fridolini, S.S., M.Hum.**  
**Christine Octavia Jafri, S.S.**



# GAGASAN ***UNSADA VOCATIONAL UNIVERSITY***

**LAPORAN WORKSHOP PERKEMBANGAN TERKINI  
AKREDITASI PERGURUAN TINGGI  
(DOKUMEN AKREDITASI 9 STANDAR)**

**BANDUNG 24-25 AGUSTUS 2018**

UNIVERSITAS DARMA PERSADA | Jl. Taman Malaka Selatan, Pondok Kelapa, Jakarta Timur 13450

**Gagasan**  
**Unsada Vocational University**

**Laporan Workshop Perkembangan Terkini Akreditasi PT**  
**Bandung 24-25 Agustus 2018**

**Oleh**  
**Dr. H. Dadang Solihin, S.E., M.A.**  
**Agustinus Hariyana, S.S., M.Si.**  
**Fridolini, S.S., M.Hum.**  
**Christine Octavia Jafri, S.S.**

**Jakarta 2018**

## Kata Pengantar



Pada 24-25 Agustus 2018 Rektor Unsada bersama Kepala Unit Penjaminan Mutu (UPM), Kepala UPT Akreditasi, dan Sekretaris Rektor mengikuti Workshop “Perkembangan Terkini Akreditasi Perguruan Tinggi” yang diselenggarakan di Bandung oleh Forum Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia (FPTVI) bekerja sama dengan Telkom University.

Unsada saat ini memiliki potensi yang luar biasa berupa jaringan dan kedekatannya dengan dunia industri dan pemerintahan. Hal ini bisa dideteksi dari berbagai MOU yang sudah ditandatangani.

Namun di sisi lain, kinerja Unsada dalam hal penelitian, publikasi jurnal ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat masih relatif minim. Oleh karena itu, hal penting yang didapat dari workshop ini adalah timbulnya pemikiran bahwa Unsada dengan Visi-Misi dan *strong points* yang dimilikinya akan lebih efektif dalam membangun bangsa ini apabila formatnya adalah *vocational university*.

Laporan ini menyajikan gambaran tentang kesiapan Universitas Darma Persada menghadapi IR 4.0 dan *Disruption*, Konsep *Link and Match*, Kebutuhan *Skilled Worker*, Konsep *Community College*, Penerapan Tridarma Perguruan Tinggi pada *Vocational University*, Kebijakan BAN-PT tentang Penyusunan Instrumen Akreditasi, serta Asosiasi Perguruan Tinggi Vokasi.

Semoga laporan ini dapat berguna bago pihak-pihak terkait sebagai bahan pemikiran tentang pentingnya mengubah orientasi pendidikan Unsada menjadi *Vocational University* yang lebih mengembangkan ilmu terapan.

Jakarta, 26 Agustus 2018

Rektor,

**Dr. H. Dadang Solihin, S.E., M.A.**

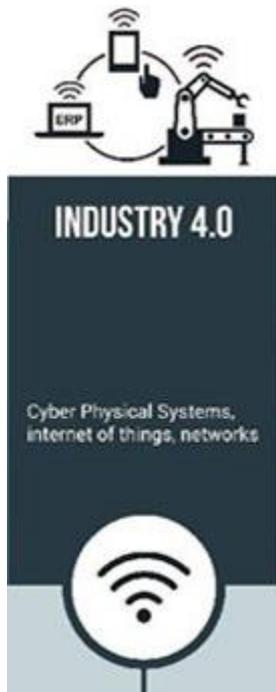
**Pembina Madya Utama/IV.D**

**NIP. 19611106 198811 1 001**

## Daftar Isi

Pengantar .....	1
Daftar Isi .....	2
Pendahuluan .....	3
Universitas Darma Persada menghadapi IR 4.0 dan <i>Disruption</i> .....	4
Konsep <i>Vocational University</i> .....	9
Konsep <i>Link and Match</i> .....	12
Kebutuhan <i>Skilled Worker</i> .....	14
Konsep <i>Community College</i> .....	16
Tridarma Perguruan Tinggi pada <i>Vocational University</i> .....	20
Kebijakan BAN-PT tentang Penyusunan Instrumen Akreditasi .....	21
Asosiasi Perguruan Tinggi Vokasi .....	31
Kepustakaan .....	33
Lampiran .....	34
1. Perkembangan Terkini Akreditasi Perguruan Tinggi, Dewan Eksekutif BANPT	
2. Akreditasi PT dan PRODI Vokasi berbasis SAPTO, Dr. Maman Abdurrohman	

## Pendahuluan



Kesuksesan suatu negara dalam menghadapi revolusi industri 4.0 erat kaitannya dengan inovasi SDM yang berkualitas, sehingga perguruan tinggi wajib dapat menjawab tantangan untuk menghadapi kemajuan teknologi dan persaingan dunia kerja di era globalisasi. Tiada yang menampik kalau laju perkembangan industri dan teknologi telah bergerak begitu pesat di dunia. Klaus Schwab, seorang ekonom asal Jerman yang juga menjadi pendiri Forum Ekonomi Dunia, menggambarkan saat ini dunia tengah memasuki revolusi industri generasi keempat (*Fourth Industrial Revolution, 4IR*). Dalam buku berjudul *The Fourth Industrial Revolution* (2017), ia menulis revolusi generasi keempat ditandai dengan munculnya superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, editing genetik dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak. 4IR telah menemukan pola baru ketika disruptif teknologi hadir begitu cepat dan mengancam keberadaan perusahaan-perusahaan *incumbent* yang telah mapan.

Pada era 4IR ini, ukuran besar perusahaan tidak menjadi jaminan. Kunci keberhasilan untuk meraih prestasi dengan cepat adalah kelincahan dan kecepatan perusahaan dalam merespons tantangan. Ini ditunjukkan oleh Uber. Aplikasi berbasis teknologi ini telah membuktikan ancumannya yang nyata kepada para pelaku industri transportasi di seluruh dunia. Contoh lainnya Airbnb yang mengancam pemain-pemain utama di industri jasa pariwisata. Sekali lagi semua itu membuktikan bahwa yang cepat dapat memangsa yang lambat, bukan yang besar memangsa yang kecil. Untuk itu, sudah sewajarnya perusahaan-perusahaan masa kini harus lebih peka dan responsif untuk melakukan introspeksi diri.

Lantas, apakah pergeseran itu hanya dialami pada perusahaan-perusahaan berorientasi bisnis saja? Sesungguhnya, perubahan yang didorong oleh inovasi dalam sains dan teknologi itu bisa juga terjadi di dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Negara-negara maju, yang selama ini menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah menyadari perubahan tersebut. Kondisi itu tentunya perlu disikapi juga pada sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Perubahan disruptif—menjungkirbalikkan sistem yang berlaku hingga akhirnya terjadi perubahan mendasar—tak boleh diabaikan. Artinya, perguruan tinggi pun tak lepas dari ancaman *disrupted* bila tidak segera melakukan perubahan dan menyesuaikan peranannya di dunia pendidikan.

Perubahan itu tentunya tidak bisa dipisahkan dengan pergeseran perilaku masyarakat yang kian adaptif terhadap perkembangan teknologi. Untuk itu, perguruan tinggi harus bisa mengantisipasinya. Dalam hal ini bagaimana mempersiapkan langkah untuk merespons tantangan dalam memposisikan dirinya sebagai penyedia jasa layanan pendidikan tinggi. Inilah yang harusnya dipersiapkan sejak dini.

## Universitas Darma Persada menghadapi IR 4.0 dan Disruption



Universitas Darma Persada sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0 dari sejak awal pendiriannya, yaitu ketika merumuskan Visi-Misinya. Sebagaimana diketahui, Visi Unsada adalah “Menjadi Universitas terkemuka di Indonesia dengan keunggulan dalam aspek Budaya yang diperkaya dengan **Monozukuri** serta memberi kontribusi berarti bagi pembangunan Bangsa dan Negara”.

Adapun Misi Unsada adalah:

1. Menyelenggarakan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dalam kerangka Tri dharma Perguruan Tinggi, yang unggul dalam bidang budaya dan **Monozukuri**.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki budaya **kreatif dalam membuat barang** (*monozukuri tetsugaku*), **semangat industri** (*sangyo spirit*), dan **jiwa wirausaha/entrepreneurship** (*kigyoka*) sehingga memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menghasilkan barang/jasa yang berdaya saing tinggi di pasar global, baik sebagai individu atau sebagai bagian dari satu sistem.
3. Menghasilkan lulusan yang trilingual yaitu menguasai bahasa Indonesia, Jepang dan Inggris.
4. Menghasilkan lulusan yang dapat dengan **cepat memperoleh pekerjaan** atau **berwirausaha**.

*Dari Visi-Misi Unsada tersebut, jelas terlihat bahwa sesungguhnya Unsada didirikan dengan konsep pengembangan ilmu terapan (vocational university).*

Dari Visi-Misi Unsada tersebut, jelas terlihat bahwa sesungguhnya Unsada didirikan dengan konsep pengembangan ilmu terapan (vocational university). Saat ini Universitas Darma Persada memiliki empat Fakultas, yaitu Fakultas Sastra, Fakultas Teknik, Fakultas Teknologi Kelautan, Fakultas Ekonomi, dan satu Sekolah Pascasarjana. *Strong point* Unsada dalam menghadapi IR 4.0 adalah trilingual, *monozukuri*, dan energi terbarukan.

Fakultas Sastra Unsada memiliki lima Program Studi, yaitu Bahasa dan Kebudayaan Jepang S1, Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok S1, Bahasa dan Kebudayaan Inggris S1, Bahasa Jepang D3, dan Bahasa Inggris D3. Fakultas Teknik Unsada memiliki lima Program Studi, yaitu Program Studi Teknik Elektro S1, Teknik Industri S1, Teknik Informatika S1, Sistem Informasi S1, dan Teknik Mesin S1.

Fakultas Teknologi Kelautan memiliki dua Program Studi, yaitu Program Studi Teknik Perkapalan S1 dan Program Studi Teknik Sistem Perkapalan S1. Fakultas Ekonomi memiliki dua Program Studi, yaitu Program Studi Manajemen S1 dan Program Studi Akuntansi S1. Sedangkan Sekolah Pascasarjana memiliki satu Program Studi, yaitu Program Studi Teknik Energi Terbarukan S2.

Untuk mencapai Visi-Misi tersebut, berdasarkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) 2015-2029 Unsada menetapkan tonggak capaian dan ukuran kuantitatif melalui fase pertumbuhan (2015-2019), fase pengembangan (2020-2024), dan fase pematangan (2025-2029). Keberhasilan pencapaian kinerja ketiga fase tersebut diukur dengan empat indikator utama, yaitu 1) Penguatan Identitas Unsada; 2) Akreditasi dan Perluasan Pengakuan (Rekognisi); 3) Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan Penyelenggaraan Tri Dharma; 4) Pengembangan Kelembagaan.

Sebagaimana diketahui, Rektor Unsada periode 2015-2019 memiliki Visi<sup>1</sup>, yaitu “Mewujudkan Unsada dengan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang inovatif, atmosfer akademik yang kondusif, dan lingkungan kampus yang harmonis untuk menjadi Universitas terkemuka di Indonesia dengan keunggulan dalam aspek budaya yang diperkaya dengan Monozukuri serta memberi kontribusi berarti bagi pembangunan Bangsa dan Negara.”

Adapun Misi Rektor Unsada periode 2015-2019 adalah:

1. Membangun postur kualitas akademik yang bermutu dan berwibawa.
2. Membangun postur kualitas program studi yang bermutu.
3. Menyelenggarakan program studi yang berhasil.
4. Membangun suasana akademik yang kondusif.
5. Membangun postur organisasi yang sehat.

Untuk mencapai Visi-Misi Rektor Unsada periode 2015-2019, dirumuskan tujuh langkah Manajemen Strategis, yaitu:

1. Analisa Delapan Area Perubahan:
  - 1) **Organisasi** yang tepat fungsi dan tepat ukuran;
  - 2) **Tatalaksana**, yaitu sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip *good university governance*;
  - 3) **Regulasi** yang lengkap, tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif;
  - 4) **SDM** yang berintegritas, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera;
  - 5) **Pengawasan** untuk meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bebas KKN;
  - 6) **Akuntabilitas** berupa meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja jajaran dan dosen;
  - 7) **Pelayanan prima** sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat terutama mahasiswa; dan
  - 8) **Mindset dan Cultural Set Dosen dan Jajaran** dengan integritas dan kinerja yang tinggi.
2. Melakukan *environmental scanning* dengan analisa SWOT<sup>2</sup>, yaitu suatu proses merinci keadaan lingkungan internal dan eksternal guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Unsada ke dalam kategori *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*, sebagai dasar untuk menentukan tujuan dan sasaran, serta strategi mencapainya untuk memiliki keunggulan meraih masa depan yang lebih baik. Aspek yang dinilai terhadap setiap variabel terpilih adalah

---

<sup>1</sup> Seleksi Calon Rektor Universitas Darma Persada @R Sasana Wiyata Unsada-Jakarta, 19 Juni 2015: “Revitalisasi Universitas Darma Persada Visi, Misi dan Agenda Strategis Calon Rektor 2015 - 2019”

<sup>2</sup> Perumusan SWOT Unsada @R Sasana Wiyata Unsada-Jakarta, 30 Juli 2015:  
<https://www.slideshare.net/DadangSolihin/perumusan-swot-dalam-rangka-agenda-revitalisasi-universitas-darma-persada-2015-2019>

Nilai Urgensi (NU) berdasarkan skala Likerts 1 (tidak penting) sampai dengan 4 (penting sekali) dan Bobot Faktor (BF) berdasarkan persentase. Setelah dilakukan *environmental scanning*, maka didapat masing-masing empat variabel untuk *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*. Sebagai hasil dari analisa SWOT, maka dapat disimpulkan ada dua fakta obyektif tentang kondisi saat ini yang berkaitan Unsada, yaitu: Kondisi W-T sebagai variabel permasalahan yang ditemukan, dan Strategi S-O sebagai variabel yang diharapkan.

3. Merumuskan Mental Model Unsada, yaitu “Kompeten dan Berdaya Saing Tinggi”.
4. Merumuskan *Strategic Map* melalui Balance Scorecard (BSC), yaitu suatu mekanisme sistem manajemen yang mampu menerjemahkan visi dan strategi organisasi ke dalam tindakan nyata di lapangan berupa kegiatan-kegiatan strategis.
5. Merumuskan *Logic Model* untuk mendapatkan program dan kegiatan yang tepat selama kurun waktu 2015-2019. *Logic Model* adalah cara mencapai tujuan akhir berupa *impact* melalui serangkaian proses yang dimulai dari *input, proses, output, outcome, dan impact*.
6. Menyusun Analisis Beban Kerja (ABK) untuk mendapatkan informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja Unsada secara sistematis.
7. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU)<sup>3</sup> sebagai inti dari *strategic map*, yang akan menjadi pegangan Unsada selama kurun waktu 2015-2019.

Selanjutnya Rektor Unsada mencanangkan 10 Program Strategis yang akan dilaksanakan selama periode masa bakti 2015-2019, yaitu:

1. Peningkatkan kualitas lulusan,
2. Membangun citra universitas,
3. Memperkokoh budaya kerja dan budaya akademik,
4. Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan infrastruktur,
5. Penguatan tatalaksana organisasi dan manajemen,
6. Penguatan sistem informasi manajemen,
7. Peningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian masyarakat,
8. Peningkatkan kerjasama dan jejaring,
9. Memperkokoh kemahasiswaan dan alumni, dan
10. Pengembangan institusional melalui pembukaan program studi/fakultas baru.

Setiap tahunnya seluruh program dalam Renstra 2015-2019 ini dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) agar secara bertahap kesepuluh program strategis tersebut dapat dicapai secara terukur dan akuntabel.

Bagian di bawah ini adalah data Unsada tiga tahun terakhir, untuk menjadi bahan pertimbangan apakah Unsada lebih siap untuk mengembangkan program studi ilmu terapan atau tetap pada format yang dilaksanakan selama ini.

Tabel di bawah ini menjelaskan bahwa Unsada hanya memiliki 2 Guru Besar dan 14 Lektor Kepala, padahal Unsada memiliki 5000 mahasiswa dan 15 Program Studi

---

<sup>3</sup> Rakor Pengembangan Key Performance Indicators, R Rapat Sasana-Unsada, 29 Februari 2016, <https://www.slideshare.net/DadangSolihin/university-performance-measurement>

**Tabel Data Dosen Tetap 2018**

No.	Pendidikan	Gelar Akademik					Total
		Guru Besar	Lektor Kepala	Lektor	Asisten Ahli	Tenaga Pengajar	
1	S-3/Sp-2	2	2	5	4	7	20
2	S-2/Sp-1	-	12	29	37	33	111
3	Profesi/ S-1/D-4*	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>		2	14	34	41	40	131

Tabel di bawah ini menjelaskan bahwa dari aspek jumlah judul penelitian, **Unsada lebih kuat pada penelitian produk terapan** dibanding dengan penelitian disertasi doktor, penelitian strategi nasional institusi, penelitian dosen pemula, maupun penelitian berbasis kompetensi.

**Tabel Jumlah Judul Penelitian**

No.	Sumber Pembiayaan	Jumlah Judul Penelitian			Total
		2015	2016	2017	
1.	Hibah Internal Unsada	32	49	72	153
2.	Hibah Ristek Dikti:				
	a. Penelitian Desentralisasi:				
	1) Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT)	1	1	-	2
	b. Penelitian Kompetitif Nasional:				
	1) Penelitian Produk Terapan	13	10	1	24
	2) Penelitian Disertasi Doktor	1	-	1	2
	3) Penelitian Strategi Nasional Institusi	-	-	3	3
	4) Penelitian Dosen Pemula	6	3	5	14
	5) Penelitian Berbasis Kompetensi	1	1	1	3
3.	Hibah Lembaga Nasional	-	-	-	-
4.	Hibah Lembaga Internasional	-	2	2	4
5.	Mandiri	-	-	-	-

Tabel di bawah ini menjelaskan bahwa judul karya ilmiah yang dihasilkan Unsada masih sedikit.

### Jumlah Judul Karya Ilmiah

No.	Jenis Karya	Jumlah Judul			Total
		2015	2016	2017	
1.	Jurnal Terindeks Nasional	-	-	-	-
2.	Jurnal Terindeks Internasional	1	3	5	9
3.	Jurnal Terakreditasi Nasional	-	-	2	2
4.	Jurnal Tidak Terakreditasi (memiliki ISSN)	1	1	2	4
5.	Pemakalah Forum Ilmiah (Prosiding):				
	a. Tingkat Nasional	1	2	7	10
	b. Tingkat Internasional	6	12	3	21
	c. Regional	52	44	49	145

Dari ketiga tabel tersebut, terlihat bahwa Unsada lebih kuat dalam mengembangkan program studi ilmu terapan (vokasi).

## Konsep Vocational University



Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang ditujukan untuk kepentingan praktis dimulai dari D-I, D-II, D-III, Sarjana Terapan, Magister Terapan dan Doktor Terapan yang berfungsi mengembangkan peserta didik agar memiliki pekerjaan keahlian terapan tertentu melalui program vokasi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang mengarahkan mahasiswa untuk

mengembangkan keahlian terapan, beradaptasi pada bidang pekerjaan tertentu dan dapat menciptakan peluang kerja.

Pendidikan vokasi menganut sistem terbuka (multi-entry-exit system) dan multimakna yang berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak, dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup life skill. Pendidikan vokasi berorientasi pada kecakapan kerja sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan serta sesuai dengan tuntutan kebutuhan lapangan kerja. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan keahlian terapan yang diselenggarakan di perguruan tinggi berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas. Bentuk penyelenggaraan pendidikan vokasi terdiri dari Program Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, dan Diploma 4. Standar nasional pendidikan vokasi dikembangkan berdasarkan standar kompetensi nasional dan/atau internasional.

**Tabel Pendidikan Akademik, Profesi dan Vokasi**

No	Jenis Pendidikan	Definisi
1.	Akademik	<p>Adalah sistem pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu. Pendidikan Akademik mencakup program pendidikan sarjana (S1), magister atau master (S2) dan doktor (S3).</p> <p>Contoh: lulusan sarjana ekonomi bergelar S.E., sarjana kedokteran mendapat gelar S.Med., sarjana teknik mendapat gelar S.T., dan sarjana hukum S.H dan sebagainya. Sama juga dengan Magister dan Doktor (DR.)</p>
2.	Profesi	<p>Adalah sistem pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang menyiapkan peserta didik untuk menguasai keahlian khusus. Lulusan pendidikan profesi mendapatkan gelar profesi.</p> <p>Contoh setelah bergelar S.E, seseorang menempuh pendidikan profesi Akuntan, maka dia bergelar S.E. Ak.</p>

No	Jenis Pendidikan	Definisi
		setelah bergelar S.Med., seseorang menempuh pendidikan profesi dokter, maka dia mendapat gelar dr. (dokter) dan lainnya.
3.	Vokasi	Adalah sistem pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu. Pendidikan vokasi mencakup program pendidikan diploma I (D1), diploma II (D2), diploma III (D3) dan diploma IV (D4). Lulusan pendidikan vokasi mendapatkan gelar vokasi, misalnya A.Ma (Ahli Madya), A.Md (Ahli Madya).

Beban pengajaran pada program pendidikan vokasi telah disusun lebih mengutamakan beban mata kuliah keterampilan dan keahlian dibandingkan dengan beban mata kuliah teori.

Contoh Program Vokasi Universitas Indonesia

#### 1. BIDANG STUDI ADMINISTRASI

- 1) Program Studi Administrasi Asuransi dan Aktuaria
- 2) Program Studi Administrasi Keuangan dan Perbankan
- 3) Program Studi Administrasi Perkantoran dan Sekretari
- 4) Program Studi Administrasi Perpajakan

#### 2. BIDANG STUDI AKUNTANSI

- 1) Program Studi Akuntansi Keuangan
- 2) Program Studi Akuntansi Teknologi Sistem Informasi
- 3) Program Studi Akuntansi Sektor Publik

#### 3. BIDANG STUDI KEDOKTERAN

- 1) Program Studi Perumahsakitan
- 2) Program Studi Fisioterapi
- 3) Program Studi Okupasi Terapi

#### 4. BIDANG STUDI KOMUNIKASI

- 1) Program Studi Penyiaran
- 2) Program Studi Hubungan Masyarakat
- 3) Program Studi Periklanan

#### 5. BIDANG STUDI MANAJEMEN INFORMASI DAN DOKUMEN

#### 6. BIDANG STUDI PARIWISATA

Berdasarkan masukan dari Ditjen DIKTI, Pusdiklat Industri Kemenperin RI serta para *stakeholders* DUDI (Dunia Usaha dan Duni Industri), maka perguruan tinggi vokasi perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kurikulum harus berdasarkan Standar Kompetensi baik itu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Standar Internasional ataupun Standar Khusus.
2. Evaluasi capaian pembelajaran dilakukan dengan mekanisme uji kompetensi yang dilakukan di Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 1 (LSP P1) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK).
3. Perlunya memasukkan kemampuan di bidang teknologi informasi.
4. Magang/kerja praktek dilakukan lebih lama dari biasa yang dilakukan.
5. Peningkatan kemampuan bahasa Inggris.
6. *Soft skill* kemampuan berkomunikasi dan meyakinkan orang lain.

## Konsep *Link and Match*<sup>4</sup>



Konsep *Link and Match* (keterkaitan dan kesepadanan) merupakan konsep keterkaitan antara lembaga pendidikan dengan dunia kerja, atau dengan kata lain *Link and Match* ini adalah keterkaitan antara pemasok tenaga kerja dengan penggunaanya. Dengan adanya keterkaitan ini maka pendidikan sebagai pemasok tenaga kerja dapat mengadakan hubungan strategis berdasarkan simbiosis mutualisme dengan dunia usaha/industri maupun proyek-proyek pemerintah.

Dengan *link dan match* ini, Perguruan Tinggi bisa mengadakan kerja sama dengan pihak lain khususnya dengan perusahaan atau industri agar mahasiswa bisa magang di perusahaan tersebut. Perguruan tinggi harus mau melakukan riset ke dunia kerja. Dengan adanya *Link and Match* tersebut Perguruan Tinggi dapat mengetahui kompetensi (keahlian) apa yang paling dibutuhkan dunia kerja dan kompetensi apa yang paling banyak dibutuhkan dunia kerja. Selain itu, Perguruan Tinggi juga akan dapat memprediksi dan mengantisipasi keahlian (kompetensi) apa yang diperlukan dunia kerja dan teknologi sepuluh tahun ke depan. Dan yang lebih penting Perguruan Tinggi harus menjalin relasi dan menciptakan link dengan banyak perusahaan agar bersedia menjadi arena belajar kerja (magang) bagi mahasiswa yang akan lulus. Dengan magang langsung (*on the spot*) ke dunia kerja seperti itu, lulusan tidak hanya siap secara teori tetapi juga siap secara praktik.

Adapun pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan *Link and Match* adalah pendekatan sosial dan pendekatan ketenagakerjaan. Pendekatan sosial merupakan pendekatan yang didasarkan atas keperluan masyarakat yang mana pendekatan ini menitikberatkan pada tujuan pendidikan dan pemerataan kesempatan dalam mendapatkan pendidikan. Pendekatan sosial merupakan pendekatan tradisional bagi pembangunan pendidikan dengan menyediakan lembaga-lembaga dan fasilitas demi memenuhi tekanan-tekanan untuk memasukan sekolah serta memungkinkan pemberian kesempatan kepada murid dan orang tua secara bebas.

Pendekatan ketenagakerjaan merupakan pendekatan yang mengutamakan kepada keterkaitan lulusan sistem pendidikan dengan tuntutan terhadap tenaga kerja pada berbagai sektor pembangunan dengan tujuan yang akan dicapai adalah bahwa pendidikan itu diperlukan untuk membantu lulusan memperoleh kesempatan kerja yang lebih baik sehingga tingkat kehidupannya dapat diperbaiki.

Pendidikan formal dianggap sebagai penentu dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, dan titik temu antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi adalah produktivitas kerja, dengan asumsi bahwa semakin tinggi mutu pendidikan, semakin tinggi produktivitas kerja, semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat. Anggapan ini mengacu pada teori Human Capital yang

---

<sup>4</sup> "Konsep Link and Match: Fungsi Pendidikan Sebagai Pemasok Tenaga Kerja Siap Pakai"  
<https://ibnsukron.wordpress.com/2012/01/29/konsep-link-and-match-fungsi-pendidikan-sebagai-pemasok-tenaga-kerja-siap-pakai/>

menerangkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena pendidikan berperan di dalam meningkatkan produktivitas kerja.

Dewasa ini banyak lontaran kritik terhadap sistem pendidikan yang pada dasarnya mengatakan bahwa perluasan kesempatan belajar cenderung telah menyebabkan bertambahnya pengangguran tenaga terdidik dari pada bertambahnya tenaga produktif yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Kritik ini tentu saja beralasan karena data sensus penduduk memperhatikan kecenderungan yang menarik bahwa proporsi jumlah tenaga penganggur lulusan pendidikan yang lebih tinggi ternyata lebih besar dibandingkan dengan proporsi penganggur dari lulusan yang lebih rendah (Ace Suryadi, 1993: 134). Dengan kata lain persentase jumlah penganggur tenaga sarjana lebih besar dibandingkan dengan persentase jumlah penganggur lulusan SMA atau jenjang pendidikan yang lebih rendah.

Namun, kritik tersebut juga belum benar seluruhnya karena cara berfikir yang digunakan dalam memberikan tafsiran terhadap data empiris tersebut cenderung menyesatkan. Cara berfikir yang sekarang berlaku seolah-olah hanya memperhatikan pendidikan sebagai satu-satunya variabel yang menjelaskan masalah pengangguran. Cara berfikir seperti cukup berbahaya, bukan hanya berakibat pada penyudutan sistem pendidikan, tetapi juga cenderung menjadikan pengangguran sebagai masalah yang selamanya tidak dapat terpecahkan.

Berdasarkan keadaan tersebut, penjelasan secara konseptual terhadap masalah-masalah pengangguran tenaga terdidik yang dewasa ini banyak disoroti oleh masyarakat, sangat diperlukan. Penjelasan yang bersifat konseptual diharapkan mampu mendudukan permasalahan pada proporsi yang sebenarnya, khususnya tentang fungsi dan kedudukan sistem pendidikan dalam kaitannya dengan masalah ketenagakerjaan.

Berangkat dari asumsi bahwa bertambahnya tingkat pengangguran disebabkan karena kegagalan sistem pendidikan, maka diperlukan adanya pendekatan-pendekatan tertentu dalam pendidikan dan konsep *Link and Match* perlu dihidupkan kembali dalam sistem pendidikan.

Konsep keterkaitan dan kesepadanan (*Link and Match*) antara dunia pendidikan dan dunia kerja yang dicetuskan mantan Mendiknas Prof. Dr. Wardiman perlu dihidupkan lagi. Konsep itu bisa menekan jumlah pengangguran lulusan perguruan tinggi yang dari ke hari makin bertambah.

Selanjutnya Soemarso, Ketua Dewan Pembina Politeknik dan juga dosen UI mengatakan bahwa konsep *Link and Match* antara lembaga pendidikan dan dunia kerja dianggap ideal. Jadi, ada keterkaitan antara pemasok tenaga kerja dengan penggunaannya. Menurut Soemarso, dengan adanya hubungan timbal balik membuat perguruan tinggi dapat menyusun kurikulum sesuai dengan kebutuhan kerja. Contoh nyata *Link and Match* dengan program magang. Perbaikan magang, dimaksudkan agar industri juga mendapatkan manfaat. Selama ini ada kesan yang mendapatkan manfaat dari magang adalah perguruan tinggi dan mahasiswa, sedangkan industri sebagian repotnya.

Di sisi lain, produk dari Perguruan Tinggi menghasilkan sesuatu yang amat berharga dan bukan hanya sekedar kertas tanpa makna, yaitu produk kepakaran, produk pemikiran dan kerja laboratorium. Produk-produk ini masih sangat jarang dilirik oleh industri di Indonesia. Produk kepakaran yang sering dipakai adalah yang bersifat konsultatif. Tetapi produk hasil laboratorium belum di akomodasi dengan baik.

Menjalankan *Link and Match* bukanlah hal yang sederhana. Karena itu, idealnya, ada tiga komponen yang harus bergerak simultan untuk menyukseskan program *Link and Match* yaitu perguruan tinggi, dunia kerja (perusahaan) dan pemerintah. Dari ketiga komponen tersebut, peran perguruan tinggi merupakan keharusan dan syarat terpenting. Kreativitas dan kecerdasan pengelola perguruan tinggi menjadi faktor penentu bagi sukses tidaknya program tersebut.

Ada beberapa langkah penting yang harus dilakukan suatu perguruan tinggi untuk menyukseskan program *Link and Match*. Perguruan tinggi harus mau melakukan riset ke dunia kerja. Tujuannya adalah untuk mengetahui kompetensi (keahlian) apa yang paling dibutuhkan dunia kerja. Berdasarkan penelitian yang dilakukan salah satu perguruan tinggi di Indonesia diketahui, kompetensi yang paling banyak dibutuhkan dunia kerja adalah kemampuan komputasi (komputer), berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan kemampuan akuntansi. Selain itu, perguruan tinggi juga harus mampu memprediksi dan mengantisipasi kompetensi apa yang diperlukan dunia kerja dan teknologi sepuluh tahun ke depan.

Jika program *Link and Match* berjalan baik, pemerintah juga diuntungkan dengan berkurangnya beban pengangguran terdidik. Karena itu, seyogianya pemerintah secara serius menjaga iklim keterkaitan dan mekanisme implementasi ilmu dari perguruan tinggi ke dunia kerja sehingga diharapkan program *Link and Match* ini berjalan semakin baik dan semakin mampu membawa manfaat bagi semua pihak.

Manfaat yang dapat dipetik dari pelaksanaan *Link and Match* sangat besar. Karena itu, diharapkan semua *stakeholders* dunia pendidikan bersedia membuka mata dan diri dan mulai bersungguh-sungguh menjalankannya. Perguruan tinggi harus lapang dada menerima bidang kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja sebagai materi kuliah utama. Perusahaan juga harus membuka pintu selebar-lebarnya bagi mahasiswa perguruan tinggi yang ingin magang (bekerja) di perusahaan tersebut. Sedangkan Pemerintah harus serius dan tidak semata memandang program *Link and Match* (keterkaitan dan kesepadanan) sebagai proyek belaka.

## Kebutuhan Skilled Worker<sup>5</sup>



Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri<sup>6</sup> mengatakan kebutuhan tenaga kerja terampil di Indonesia mencapai 113 juta pada 2030. Hal itu berdasarkan hasil riset McKinsey Global Institute (MGI) yang diolah dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2016, dimana Indonesia memiliki potensi menjadi negara ekonomi ke-7 terbesar di dunia pada 2030

mendatang.

Di satu sisi, hasil riset Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan yang diolah dari data BPS pada 2015 menunjukkan jumlah tenaga kerja terampil yang dimiliki Indonesia saat ini baru 57 juta orang. Artinya Indonesia membutuhkan *supply* tenaga kerja terampil sebanyak 3,7 juta per tahunnya.

Selain kekurangan tenaga kerja terampil, persoalan lain yakni kondisi angkatan kerja Indonesia yang didominasi lulusan SLTA ke bawah juga *mismatch* keterampilan antara pekerjaan dengan latar belakang pendidikan. Oleh sebab itu, salah satu cara mengejar ketertinggalan jumlah tenaga kerja terampil yakni dengan menggandeng pihak swasta melalui program magang nasional terpadu di industri.

Melalui pemagangan peserta akan mendapatkan pengalaman kerja pada dunia kerja yang sesungguhnya, membentuk sikap mental, perilaku kerja serta kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga hal tersebut menjadi modal yang sangat penting bagi seseorang untuk mendapatkan pekerjaan atau bekerja secara mandiri. Langkah ini akan mendorong tenaga kerja mendapatkan pengalaman peningkatan keahlian yang terdiri 75 persen praktik. Selama magang industri berkewajiban untuk memfasilitasi proses penyelenggaraan dan kebutuhan peserta termasuk asuransi, kecelakaan kerja, kematian, dan uang saku.

---

<sup>5</sup> Kebutuhan data ketenagakerjaan untuk pembangunan berkelanjutan, Presentation at the Economic and Social Council 2015 Integration Segment - "Achieving sustainable development through employment creation and decent work for all": Indonesia country level consultation," Jakarta, 24-25 February 2015,  
[http://www.ilo.org/jakarta/WCMS\\_346599/lang--en/index.htm](http://www.ilo.org/jakarta/WCMS_346599/lang--en/index.htm)

<sup>6</sup> Menaker: RI Butuh 3,7 Juta Tenaga Kerja Terampil Per Tahun, 13 April 2017,  
<https://news.detik.com/berita/d-3474059/menaker-ri-butuh-37-juta-tenaga-kerja-terampil-per-tahun>

## Konsep *Community College*<sup>7</sup>



Kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam upaya mewujudkan ketersediaan pendidikan tinggi Indonesia yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional dilakukan antara lain dengan: (i) mengembangkan pendidikan vokasi jangka pendek (D-I dan D-II) yang berorientasi pada lapangan kerja di daerah maupun dunia usaha dan dunia industri (DUDI); dan (ii) memperluas akses pendidikan tinggi di daerah

dan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK). Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan potensi daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, salah satu bentuk perguruan tinggi adalah Akademi Komunitas (AK). Melalui pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh AK di daerah, diharapkan kemampuan lulusan SLTA dapat ditingkatkan agar bisa mandiri, dan mampu meningkatkan *human capital* secara nasional. Pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh AK juga memungkinkan lulusannya melanjutkan studi ke strata yang lebih tinggi baik di akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, maupun universitas.

AK yang diselenggarakan oleh masyarakat yang selanjutnya disebut Akademi Komunitas Swasta, dan disingkat AK Swasta, dapat didirikan di kabupaten/kota dengan orientasi pendidikan yang sesuai dan mampu mendorong pengembangan potensi daerah. Pemberian ijin pendirian dilakukan melalui evaluasi proposal yang diajukan, dan pemenuhan persyaratan perijinan AK Swasta sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 48 Tahun 2013 oleh badan hukum penyelenggara yang akan mendirikannya. Panduan ini diharapkan dapat membantu dalam proses penyusunan proposal pendirian dan pemenuhan persyaratan penetapan ijin AK Swasta.

Potensi sosial ekonomi ditambah dengan sumber kekayaan alam melimpah dimiliki oleh Indonesia. Namun pada banyak hal keduanya belum didayagunakan secara maksimal untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Di antara berbagai kendala yang dihadapi penyebab utamanya antara lain adalah keterbatasan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia, serta kemampuan teknologi yang masih terkendala banyak hal. Dalam kaitan ini peran pendidikan berorientasi keterampilan atau vokasi menjadi penting dan strategis untuk mendorong terjadinya optimalisasi pendayagunaan potensi sumber daya yang unik di setiap daerah.

Kemampuan berinovasi dalam menghasilkan berbagai jenis produk maupun jasa merupakan kata kunci dalam mendorong keberhasilan suatu bangsa. Kemampuan tersebut dapat dijadikan parameter kemampuan bangsa dalam mengelolakan mengatasi persaingan era pasar global. Dalam memperkuat posisi strategis bangsa pada persaingan di era global tersebut, menjadi keharusan untuk mengoptimalkan secara harmonis semua sumber kehidupan potensial yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dan berbagai komunitas perlu dieksplorasi dan ditingkatkan pendayagunaannya. Secara geografis Indonesia dengan belasan ribu pulau dan

---

<sup>7</sup> <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/DitlemkermaPanduanAKolehMasyarakat2014.pdf>

aneka ragam suku bangsa dan variasi kondisi alamnya, dapat menjadi pemicu terbentuknya berbagai komunitas pada berbagai jenjang masyarakat dan lingkungan dengan ciri dan karakteristik uniknya.

Peningkatan fungsi dan peran komunitas dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan warganya menjadi pilihan utama kebijakan pembangunan di Indonesia. Komunitas dapat berbasis pekerjaan, profesi, industri, budaya, sosial-keagamaan, organisasi sosial. Perhatian utama itu telah dirumuskan dalam visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 yakni "Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur", diterjemahkan dalam Visi Indonesia 2025.

Pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional berperan strategis dalam meningkatkan dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pembangunan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan. Pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi diperlukan sebagai perangkat peningkatan daya saing bangsa dalam kancah persaingan global. Perguruan tinggi harus mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa. Bentuk perguruan tinggi diperluas dengan menambah akademi komunitas selain dari universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi.

Mengacu pada prinsip belajar sepanjang hayat (*lifelong learning*), masyarakat berbasis komunitas diharapkan terus meningkatkan pengetahuan, kompetensi, keahlian, dan keterampilannya dari waktu ke waktu untuk meningkatkan kualitas kehidupannya agar mencapai kehidupan yang lebih baik. Sifat yang khusus dan heterogen akan sangat membutuhkan sebuah model pendidikan tinggi yang dapat memenuhi kebutuhan beragam komunitas yang dikenal di beberapa negara dengan sebutan *Community College* (CC). Model pendidikan berbasis komunitas di Indonesia ditambahkan dengan penekanan terhadap potensi wilayah dan kebutuhan khusus dalam bentuk perguruan tinggi yang disebut Akademi Komunitas (AK).

### **Rasional Pendirian Akademi Komunitas**

Komposisi tenaga kerja ideal yang dibutuhkan adalah dengan meningkatkan jumlah lulusan perguruan tinggi dengan menambah jumlah lulusan program diploma dan sarjana. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan tinggi memberi kontribusi pada komposisi tenaga kerja profesional berkualitas. Prioritas pemenuhannya melalui penyediaan tenaga vokasi siap pakai pada jenjang diploma. Dengan peningkatan prosentase lulusan program diploma, maka akan dapat dipercepat pertumbuhan ekonomi di setiap KE. Hal ini sesuai dengan kaidah piramida komposisi tenaga kerja negara yang sedang mendorong pertumbuhan ekonominya. Kelompok tenaga kerja ini mendorong produktivitas, disisi lain tenaga kerja lulusan perguruan tinggi berbasis keilmuan menghasilkan pemikiran dan inovasi. Sinergi dari dua komposisi tenaga kerja tersebut menghasilkan produk domestik kompetitif dan meningkatkan nilai tambah.

Kebijakan penyelenggaraan pendidikan AK di daerah selain akan pemeratakan akses pendidikan tinggi, sekaligus akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di seluruh lapisan masyarakat. Lulusan AK selain dapat meningkatkan partisipasi

terhadap dunia kerja, juga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pada konteks tersebut, peran pendididkatinggi akademi komunitas sebagai perangkat transformasi sosial penduduk baik dalam peningkatan sumber daya manusia di daerah, partisipasi dalam dunia kerja di daerah, peningkatan daya beli masyarakat di daerah dan angka partisipasi pendidikan tinggi di daerah. Posisi strategis akademi komunitas adalah mengubah paradigma kependudukan yang dapat berpotensi menjadi faktor pemicu percepatan pembangunan dan kesejahteraan sosial di kabupaten/kota. Lulusan akademi komunitas akan mampu mengisi posisi tenaga kerja terampil pada level tertentu, khususnya setara dengan jenjang kualifikasi 4 (empat) dan 5 (lima) menurut standar KKNl. Sesuai dengan karakteristik, jenis dan tujuannya, AK yang disiapkan adalah akademi komunitas yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi sosial, ekonomi dan budaya masing-masing daerah.

Pendirian akademi komunitas akan semakin mengakomodasi warga masyarakat ke jenjang pendidikan tinggi, sehingga kebutuhan tenaga terampil dapat dipenuhi dandapat membantu peningkatanAngka Partisipasi Kasar (APK) secara signifikan.

### **Akademi Komunitas Swasta**

Pendidikan yang dilaksanakan dalam format komunitas di Indonesia dalam bentuk semacam *community college* (CC), yaitupendidikan yang diselenggarakan berupa kursus terakreditasi maupun akademi, pada dasarnya sudah lama beroperasi. Program satu atau dua tahun ini diselenggarakan melalui dua pendekatan, yaitu: (i) pendidikan formal Diploma Satu (D-I) dan Diploma Dua (D-II), dan (ii) pendidikan non-formal seperti pelatihan bersertifikat keahlian. Akan tetapi program tersebut belum didasarkan pada potensi daerah dimana program pendidikan tersebut diselenggarakan. Bentuk CC ini selanjutnya dikembangkan oleh pemerintah menjadi pendidikan formal dalam bentuk perguruan tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi berbentuk akademi komunitas.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mengatur bahwa akademi komunitas adalah bentuk perguruan tinggi selain dari bentuk perguruan tinggi yang sudah ada yaitu: universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi. Akademi Komunitas merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi program Diploma Satu (D-I) dan/atau Diploma Dua (D-II) dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.

Akademi komunitas harus dikelola profesional untuk mampu menghasilkan lulusan terampil dengan etos kerja tinggi, serta harus didukung dengan program akademik, kurikulum, silabus dengan orientasi sinergi antara akademisi dengan masyarakat, dan organisasi profesi, serta dukungan penuh industri. Lulusannya sebagai produk pendidikan tinggi harus siap pakai sebagai pelaku kegiatan pada pusat pertumbuhan ekonomi setiap koridor ekonomi. Keberadaannya pada setiap kota/kabupaten seluruh Indonesia harus menjadi pertimbangan utama dengan peran sebagai penyedia tenaga profesional sesuai potensi wilayah. Akademi komunitas beroperasi di wilayah atau komunitas dengan biaya terjangkau dan harus sesuai dengan potensi wilayahnya, yang diharapkan menjadi penghasil insan profesional unggul. AK dapat diselenggarakan dengan status : (1) AK Negeri, (2) AK Swasta. Berdasarkan Permendikbud No 48 Tahun 2013, AK dapat diselenggarakan atas dasar perjanjian kerja sama antara: (i) Kementerian bersama pemerintah daerah dengan dunia usaha,

dan/atau dunia industri; atau (ii) masyarakat dengan dunia usaha dan/atau dunia industri.

## Tridarma Perguruan Tinggi pada *Vocational University*



Pembelajaran: 30% teori, 70% praktik dengan penerapan sistem 3+2+1. Tiga semester aktif di kampus, dua semester di industri, dan satu semester akhir di kampus atau industri.

Penelitian: riset dan publikasi terapan. Penelitian Terapan dilakukan untuk mencari pemecahan masalah-masalah nyata (riil) dalam kehidupan secara ilmiah. Hasil penelitian yang obyektif mengenai latar belakang dan sebab-sebab suatu masalah, merupakan petunjuk yang dapat dipergunakan

dalam menyusun implementasi dan alternatif saran-saran tindakan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Oleh karena itulah penelitian terapan dapat dilakukan untuk semua bidang kehidupan, baik yang berhubungan dengan Ilmu Sosial maupun Ilmu Eksakta, bahkan juga yang bersifat inter disiplinier. Dengan demikian berarti Penelitian Terapan yang dilaksanakan secara cermat, akan dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh orang-orang yang bergerak di bidang usaha/niaga dan jasa, industri, pertanian, hukum, pendidikan, teknologi dll.

Pengabdian kepada Masyarakat: Bentuk program pengabdian masyarakat pada Perguruan Tinggi Vokasi merupakan program untuk pengembangan dan penerapan hasil-hasil penelitian, sehingga diharapkan program pengabdian kepada masyarakat dapat membantu memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat dengan menitikberatkan pada karya yang lebih aplikatif dan dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat pada umumnya.



## **Kebijakan Majelis Akreditasi BAN-PT tentang Penyusunan Instrumen Akreditasi<sup>8</sup>**



### **Latar Belakang dan Rasional**

Pasal 55 UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa: (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN-Dikti; (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 3 (1) Permenristekdikti No 32/2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi menyatakan bahwa akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Pendidikan Tinggi. Yang dimaksud Standar Pendidikan Tinggi adalah Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditambah Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan Perguruan Tinggi.

Selanjutnya, Pasal 7 Permenristekdikti No 32/2016 tentang Akreditasi mengatur hal-hal sebagai berikut:

- (1) Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi.
- (2) Instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. instrumen akreditasi untuk Program Studi; dan
  - b. instrumen akreditasi untuk Perguruan Tinggi.
- (3) Instrumen akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi disusun berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Pendidikan Tinggi.
- (4) Instrumen akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan:
  - a. jenis pendidikan, yaitu vokasi, akademik, profesi;
  - b. program pendidikan, yaitu program diploma, sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, profesi, spesialis, doktor, dan doktor terapan;
  - c. modus pembelajaran, yaitu tatap muka dan jarak jauh; dan
  - d. hal-hal khusus.
- (5) Instrumen akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun berdasarkan pengelolaan perguruan tinggi, yaitu perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi negeri dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, atau perguruan tinggi negeri badan hukum.

Sementara itu Pasal 10 huruf b menyatakan bahwa BAN-PT bertugas dan berwenang

---

<sup>8</sup> Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 4/2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi

dalam menyusun dan menetapkan instrumen akreditasi Perguruan Tinggi berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi. Namun demikian mengingat pada ketentuan peralihan Pasal 54 (1) menyatakan bahwa sebelum LAM terbentuk akreditasi Program Studi dilakukan oleh BAN-PT, maka BAN-PT juga masih perlu memperhatikan penyusunan dan penetapan instrumen akreditasi PS.

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, BAN-PT menetapkan instrumen akreditasi yang mencakup instrumen akreditasi program studi dan instrumen akreditasi perguruan tinggi. Instrumen akreditasi perguruan tinggi disusun dan dikembangkan dengan mempertimbangkan kekhususan sistem tata kelola perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan. Instrumen akreditasi program studi disusun dengan mempertimbangkan jenis dan jenjang pendidikan, modus pembelajaran, dan kekhususan program studi.

Instrumen akreditasi program studi terdiri dari instrumen yang menilai hal-hal yang bersifat umum lintas program studi (generik) dan instrumen penilaian tentang kekhususan program studi (spesifik).

## **Tujuan**

Kebijakan ini disusun sebagai acuan bagi Dewan Eksekutif BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri dalam menyusun instrumen akreditasi untuk ditetapkan oleh Majelis Akreditasi BAN-PT, untuk memastikan bahwa instrumen akreditasi disusun selaras dengan peraturan perundangan dan kebijakan yang berlaku.

## **Kebijakan**

Kriteria akreditasi adalah patokan minimal akreditasi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam pengembangan kriteria akreditasi, SN-Dikti dijadikan sebagai acuan utama. Kriteria akreditasi dijabarkan ke dalam elemen penilaian dengan mempertimbangkan interaksi antar standar dari SN-Dikti yang mengukur capaian mutu pendidikan tinggi. Mengingat akreditasi tidak hanya menilai pemenuhan (*compliance*), namun juga menilai kinerja (*performance*) program studi atau perguruan tinggi, maka penilaian akreditasi mempertimbangkan capaian standar pendidikan tinggi yang disusun dan ditetapkan perguruan tinggi yang melampaui SN-Dikti. Selain itu, penilaian akreditasi juga memperhatikan elemen-elemen lain yang relevan dan penting terkait mutu pendidikan tinggi yang tidak secara eksplisit tercantum dalam SN-Dikti, antara lain Peraturan Pemerintah No. 4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Permenristekdikti No.100/2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Penilaian akreditasi dilakukan dengan menggunakan data dan informasi yang tersedia pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

## **Kaidah Penilaian dan Penyusunan Instrumen Akreditasi Program Studi**

Kaidah yang digunakan dalam mengembangkan penilaian dan instrumen akreditasi adalah sebagai berikut:

1. Penilaian akreditasi diarahkan pada capaian kinerja tridharma perguruan tinggi (*outcome-based accreditation*), peningkatan daya saing, dan wawasan

internasional (*international outlook*) pada program studi. *Outcome-based accreditation* yang dimaksud di sini adalah, pada akreditasi program studi berfokus pada ketercapaian capaian pembelajaran lulusan.

2. Penilaian akreditasi dilakukan secara uji tuntas dan komprehensif yang mencakup elemen pemenuhan (*compliance*) terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, dan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pendidikan tinggi, serta konformansi (*conformance*) yang diukur melalui kinerja mutu (*performance*) dalam konteks akuntabilitas publik; Rujukan-rujukan penting yang perlu diperhatikan dalam penilaian akreditasi adalah:
  - Permenristekdikti No. 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
  - Permenristekdikti No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
  - Permenristekdikti No. 32/2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
  - Peraturan Pemerintah No. 4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - Peraturan Presiden No. 8/2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
  - Permenristekdikti No. 26/2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau
  - Permenristekdikti No. 100/2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Penilaian pemenuhan terhadap SN-Dikti dan peraturan perundang-undangan yang relevan dilihat secara agregat, kecuali untuk butir-butir standar yang bersifat mutlak, yaitu:

- Pemenuhan persyaratan legal pendirian perguruan tinggi
- Pemenuhan persyaratan lahan
- Pemenuhan persyaratan dosen tetap program studi

Ketidakberhasilan memenuhi butir-butir standar yang bersifat mutlak dapat berimplikasi pada status tidak terakreditasi.

3. Penilaian akreditasi mencakup aspek kondisi, kinerja, dan pencapaian mutu akademik dan non-akademik program studi. *Outcome-based accreditation* tidak diartikan sebagai penilaian luaran dan outcome penyelenggaraan program studi saja, namun juga menilai pemenuhan SN-Dikti yang menyangkut input dan proses. Oleh karena itu penilaian akreditasi harus mencakup Input–Proses–Output–Outcome dari penyelenggaraan program studi. Bobot penilaian ditetapkan dengan prioritas tertinggi (bobot tertinggi) pada aspek luaran dan capaian (outputs dan outcomes) diikuti aspek proses dan input.
4. Penilaian akreditasi didasarkan pada ketersediaan bukti yang sesungguhnya dan sah (*evidence-based*) serta ketertelusuran (*traceability*) dari setiap aspek penilaian. Untuk memastikan akurasi hasil penilaian akreditasi, maka penilaian

tidak semata berdasar pada dokumen akreditasi yang diajukan oleh perguruan tinggi, tetapi harus disertai dengan penelaahan bukti-bukti yang sah serta ketertelusurannya pada setiap aspek penilaian. Hal ini berimplikasi pada keharusan adanya asesmen lapang.

5. Penilaian akreditasi mengukur keefektifan dan konsistensi antara dokumen dan penerapan sistem manajemen mutu perguruan tinggi. Perguruan tinggi wajib mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu internal (SPMI), yang di dalamnya terkandung aspek penetapan standar pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi yang melampaui SN-Dikti. Oleh karena itu penilaian akreditasi harus mencakup pula keberadaan, efektifitas dan konsistensi pelaksanaan SPMI serta ketercapaian standar yang ditetapkan perguruan tinggi. Penilaian ini tidak saja dilakukan pada elemen penilaian khusus yang terkait dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal, melainkan juga melekat pada setiap kriteria akreditasi.
6. Penilaian akreditasi didasarkan pada gabungan penilaian yang bersifat kuantitatif dan penilaian kualitatif. Penilaian akreditasi dilakukan terutama terhadap hasil evaluasi diri Program Studi yang dituangkan dalam dokumen akreditasi dengan format-format terstandar yang ditetapkan LAM atau BAN-PT. Format terstandar dapat berupa Format Isian (borang) input, proses, output dan outcome (kinerja) dan/atau Format Evaluasi Diri (Self Assessment Report). Unit pengelola Program Studi harus menyediakan sekaligus menggunakan data dan informasi yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, baik yang sudah tersimpan dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi maupun yang belum, untuk menunjukkan efektifitas sistem penjaminan mutu internal pada mutu luaran.
7. Instrumen akreditasi berisi deskriptor dan indikator yang efektif dan efisien serta diyakini bersifat determinan dari setiap elemen penilaian.
8. Deskriptor dan indikator instrumen akreditasi memiliki tingkat kepentingan (*importance*) dan relevansi tinggi (*relevance*) terhadap mutu pendidikan tinggi. Instrumen akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi disusun berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Pendidikan Tinggi dan dituangkan dalam bentuk elemen penilaian, deskriptor dan indikator. Elemen penilaian dan deskriptor harus secara komprehensif mencakup seluruh butir standar dari SN-Dikti dalam bingkai kriteria akreditasi dan memiliki relevansi tinggi terhadap mutu pendidikan tinggi, namun dengan jumlah yang dibatasi (efisien dan efektif).
9. Instrumen akreditasi memiliki kemampuan untuk mengukur dan memilah gradasi mutu program studi dan perguruan tinggi. Proses akreditasi menghasilkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi. Oleh karena itu instrumen akreditasi harus memiliki kemampuan untuk mengukur dan memilah gradasi mutu program studi dan perguruan tinggi yang tercermin pada status akreditasi dan peringkat terakreditasi. Peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi terdiri atas terakreditasi baik, baik sekali, dan unggul. Makna peringkat terakreditasi baik adalah memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, terakreditasi baik sekali dan terakreditasi unggul adalah melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tingkat pelampauan untuk mencapai peringkat terakreditasi baik sekali ditetapkan berdasarkan hasil interaksi antar standar yang membawa Program Studi pada pencapaian daya saing di tingkat nasional, sedang pelampauan untuk mencapai peringkat terakreditasi unggul ditetapkan berdasarkan hasil interaksi antar standar yang membawa Program Studi pada pencapaian daya saing di tingkat internasional.

## Dimensi Penilaian

Penilaian dan instrumen akreditasi harus dapat mengukur dimensi:

1. **Mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola:** meliputi integritas visi dan misi, kepemimpinan (*leadership*), tata pamong, sistem manajemen sumberdaya, kemitraan strategis (*strategic partnership*), dan sistem penjaminan mutu internal;
2. **Mutu dan produktivitas luaran (*outputs*) dan capaian (*outcomes*):** berupa kualitas lulusan, produk ilmiah dan inovasi, serta kemanfaatan bagi masyarakat;
3. **Mutu proses:** mencakup proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan suasana akademik;
4. **Mutu input:** meliputi sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), mahasiswa, kurikulum, sarana prasarana, keuangan (pembiayaan dan pendanaan).

## Titik berat penilaian Akreditasi Program Studi berdasarkan kriteria akreditasi

### 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)

- Kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antara visi keilmuan, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian sasaran unit pengelola Program Studi, keterkaitannya dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Darma Persada, serta keterkaitan dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan.
- Pemahaman, komitmen dan konsistensi pengembangan Program Studi untuk mencapai visi dan capaian pembelajaran lulusan serta mutu yang ditargetkan dengan langkah-langkah program yang terencana, efektif, dan terarah.

### 2. Tata pamong dan kerjasama

- Kinerja dan keefektifan kepemimpinan, tata pamong, dan sistem manajemen sumberdaya unit pengelola Program Studi, serta pemenuhan aspek-aspek (1) kredibel, (2) transparan, (3) akuntabel, (4) bertanggung jawab, dan (5) adil dalam tata kelola Program Studi.
- Konsistensi dan keefektifan implementasi sistem penjaminan mutu di tingkat Program Studi; sistem komunikasi dan teknologi informasi; program dan kegiatan yang diarahkan pada perwujudan visi dan penuntasan misi unit pengelola Program Studi yang bermutu.
- Terbangun dan terselenggaranya kerjasama dan kemitraan strategis dalam penyelenggaraan Program Studi, baik akademik maupun non akademik, secara berkelanjutan pada tataran nasional, regional, maupun internasional untuk mencapai capaian pembelajaran dan meningkatkan daya saing lulusan.

### 3. Mahasiswa

- Konsistensi pelaksanaan dan keefektifan sistem penerimaan mahasiswa baru yang adil dan objektif.
- Keseimbangan rasio mahasiswa dengan dosen dan tenaga kependidikan yang menunjang pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien.

- Program, keterlibatan dan prestasi mahasiswa dalam pembinaan minat, bakat, dan keprofesian.
- Efektifitas sistem layanan bagi mahasiswa dalam menunjang proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

#### **4. Sumber Daya Manusia**

- Keefektifan sistem perekrutan, ketersediaan sumberdaya manusia (pendidik dan tenaga kependidikan) dari segi jumlah, kualifikasi pendidikan dan kompetensi untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- Pelaksanaan kebijakan pengembangan, pemantauan, penghargaan, sanksi dan keputusan hubungan kerja, baik bagi dosen maupun tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu sesuai visi dan misi perguruan tinggi.
- Keberadaan mekanisme survei kepuasan, tingkat kepuasan, dan umpan balik dosen dan tenaga kependidikan tentang manajemen SDM.

#### **5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana**

- Kecukupan, keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas, serta keberlanjutan pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Pemenuhan ketersediaan (availability) sarana prasarana, akses civitas akademika terhadap sarana prasarana (accessibility), kegunaan atau pemanfaatan (utility) sarana prasarana oleh civitas akademika, serta keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan dalam menunjang tridharma perguruan tinggi.

#### **6. Pendidikan**

- Kesesuaian dan keunggulan capaian pembelajaran lulusan Program Studi, kesesuaian kurikulum dengan bidang ilmu Program Studi dan capaian pembelajaran lulusan beserta kekuatan dan keunggulan kurikulum, budaya akademik, proses pembelajaran, sistem penilaian, dan sistem penjaminan mutu untuk menunjang tercapainya capaian pembelajaran lulusan dalam rangka pewujudan visi dan misi unit pengelola Program Studi.
- Integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam proses pendidikan.

#### **7. Penelitian**

- Arah pengembangan penelitian dan komitmen untuk mengembangkan penelitian yang bermutu, keunggulan dan kesesuaian program penelitian dengan visi keilmuan unit pengelola Program Studi.
- Intensitas kegiatan penelitian dan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian.

#### **8. Pengabdian kepada Masyarakat**

- Arah pengembangan pengabdian kepada masyarakat dan komitmen untuk mengembangkan dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, yang bermutu.

- Intensitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat (jumlah dan jenis kegiatan), keunggulan dan kesesuaian program pengabdian kepada masyarakat, serta cakupan daerah pengabdian.

#### **9. Luaran dan Capaian: hasil pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat**

- Produktivitas program pendidikan, dinilai dari efisiensi edukasi dan masa studi mahasiswa.
- Pencapaian kualifikasi dan capaian pembelajaran lulusan (berupa gambaran yang jelas tentang profil dan capaian pembelajaran lulusan dari Program Studi,
- Penelusuran lulusan, umpan balik dari pengguna lulusan, dan persepsi publik terhadap lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan/ kompetensi yang ditetapkan oleh Program Studi dan perguruan tinggi dengan mengacu pada KKN I
- Jumlah dan keunggulan publikasi ilmiah, jumlah sitasi, jumlah hak kekayaan intelektual, dan kemanfaatan/ dampak hasil penelitian terhadap pewujudan visi dan penyelenggaraan misi, serta kontribusi pengabdian kepada masyarakat pada pengembangan dan pemberdayaan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

### **Titik Berat Penilaian APT berdasarkan Kriteria Akreditasi**

#### **1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)**

- Kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian sasaran perguruan tinggi.
- Pemahaman, komitmen dan konsistensi pengembangan perguruan tinggi untuk mencapai kinerja dan mutu yang ditargetkan dengan langkah-langkah program yang terencana, efektif, dan terarah dalam rangka pewujudan visi dan penyelenggaraan misi.
- Adopsi visi, misi, tujuan dan sasaran perguruan tinggi sebagai pedoman pengembangan unit-unit di dalam lingkungan perguruan tinggi.

#### **2. Tata pamong dan kerjasama**

- Kelengkapan struktur dan organ perguruan tinggi untuk dapat mewujudkan prinsip-prinsip tata pamong yang baik dan efektif.
- Kinerja dan keefektifan kepemimpinan; tata pamong, sistem manajemen sumberdaya dan program perguruan tinggi, termasuk sistem komunikasi dan teknologi informasi yang digunakan untuk mendukung tata pamong dan tata kelola perguruan tinggi.
- Kelengkapan dan kejelasan sistem penjaminan mutu internal serta konsistensi dan keefektifan implementasinya.
- Kebijakan dan terselenggaranya kerjasama dan kemitraan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik akademik maupun non akademik pada perguruan tinggi secara berkelanjutan pada tataran nasional, regional, maupun internasional, serta keefektifannya untuk mencapai visi dan misi perguruan tinggi dan meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

### **3. Mahasiswa**

- Kebijakan sistem penerimaan mahasiswa baru yang memenuhi prinsip-prinsip keterbukaan akses dan ekuitas serta konsistensi pelaksanaannya.
- Keefektifan sistem penerimaan mahasiswa baru yang adil dan objektif, keseimbangan rasio mahasiswa dengan dosen dan tenaga kependidikan di tingkat perguruan tinggi yang menunjang pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien.
- Kebijakan, program, keterlibatan, dan prestasi mahasiswa dalam pembinaan minat, bakat, dan keprofesian.
- Kebijakan dan penyelenggaraan sistem layanan bagi mahasiswa.

### **4. Sumber Daya Manusia**

- Kebijakan dan sistem perekrutan, pengembangan, pemantauan, penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja, baik bagi dosen maupun tenaga kependidikan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu sesuai visi dan misi perguruan tinggi serta konsistensi pelaksanaannya.
- Keefektifan sistem perekrutan, pengembangan, pemantauan, penghargaan, dan sanksi pada ketersediaan sumberdaya dari segi jumlah, kualifikasi pendidikan dan kompetensi, untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu sesuai visi dan misi perguruan tinggi.
- Keberadaan mekanisme survei kepuasan, tingkat kepuasan, dan umpan balik dosen dan tenaga kependidikan tentang manajemen SDM.

### **5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana**

- Kebijakan dan sistem pembiayaan penyelenggaraan pendidikan tinggi serta konsistensi pelaksanaannya.
- Kecukupan, keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas, serta keberlanjutan pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- Kebijakan dan sistem penyediaan serta pemeliharaan sarana prasarana penyelenggaraan pendidikan tinggi serta konsistensi pelaksanaannya.
- Kecukupan, keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas, serta keberlanjutan penyediaan serta pemeliharaan sarana prasarana untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

### **6. Pendidikan**

- Kebijakan dan dukungan perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, sistem penilaian, dan sistem penjaminan mutu untuk menunjang tercapainya capaian pembelajaran lulusan dalam rangka pewujudan visi dan misi penyelenggaraan perguruan tinggi.
- Kebijakan integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam proses pendidikan dan konsistensi pelaksanaannya.

### **7. Penelitian**

- Kebijakan dan arah pengembangan penelitian tingkat perguruan tinggi serta dukungan perguruan tinggi pada pengembangan dan pelaksanaan kegiatan penelitian di unit kerja.
- Keunggulan, kesesuaian arah, dan program penelitian dengan visi perguruan tinggi, serta capaian jumlah dan lingkup penelitian.

#### **8. Pengabdian kepada Masyarakat**

- Kebijakan dan arah pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat perguruan tinggi serta dukungan perguruan tinggi pada pengembangan dan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di unit kerja.
- Keunggulan dan kesesuaian program pengabdian pada masyarakat dengan visi dan misi perguruan tinggi, serta capaian jumlah, lingkup dan jangkauan wilayah pengabdian pada masyarakat.

#### **9. Luaran dan Capaian: hasil pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat**

- Produktivitas program pendidikan, dinilai dari efisiensi edukasi dan masa studi mahasiswa.
- Penelusuran lulusan, umpan balik dari pengguna lulusan, dan persepsi publik terhadap lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan oleh program studi dan perguruan tinggi dengan mengacu pada KKNI;
- Jumlah dan keunggulan publikasi ilmiah, jumlah sitasi, jumlah hak kekayaan intelektual, dan kemanfaatan/dampak hasil penelitian terhadap pewujudan visi dan penyelenggaraan misi, serta kontribusi pengabdian kepada masyarakat pada pengembangan dan pemberdayaan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

#### **Kelengkapan Instrumen Akreditasi**

Kelengkapan instrumen akreditasi untuk Program Studi dan Perguruan Tinggi terdiri atas:

1. BUKU I      NASKAH AKADEMIK AKREDITASI PROGRAM STUDI
2. BUKU II     KRITERIA DAN PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI
3. BUKU III    A. DOKUMEN KINERJA PROGRAM STUDI  
                  B. LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI
4. BUKU IV    A. PANDUAN PENGISIAN DOKUMEN KINERJA PROGRAM STUDI  
                  B. PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI
5. BUKU V     A. PEDOMAN PENILAIAN DOKUMEN KINERJA PROGRAM STUDI  
                  B. PEDOMAN PENILAIAN LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM

STUDI

- 6. BUKU VI
  - A. MATRIKS PENILAIAN DOKUMEN KINERJA PROGRAM STUDI
  - B. MATRIKS PENILAIAN LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI
- 7. BUKU VII
  - PEDOMAN ASESMEN LAPANGAN AKREDITASI PROGRAM STUDI

## Asosiasi Perguruan Tinggi Vokasi<sup>9</sup>

FPTVI adalah Forum Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia yang beranggotakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi (diploma). FPTVI berdiri pada tahun 2015 di Universitas Gadjah Mada dan saat ini beranggotakan 114 Perguruan Tinggi penyelenggara program vokasi (UNISTA – Universitas, Institut, Sekolah Tinggi dan Akademi).

Forum Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia (FPTVI – semula bernama Forum Komunikasi Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia) resmi berdiri pada tanggal 28 Oktober 2014, yaitu saat diselenggarakannya Kongres I di Sekolah Vokasi UGM, Sekip, Yogyakarta.

Forum ini diinisiasi oleh 5 Universitas penyelenggara pendidikan vokasi, yaitu Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Universitas Brawijaya, dan Universitas Negeri Yogyakarta.

Berdirinya FPTVI ini diawali dari penyelenggaraan Lokakarya tentang “Penegasan Pendidikan Vokasi Sesuai UU No 12 Tahun 2012” tanggal 3 April 2014, di Sekolah Vokasi UGM, yang dihadiri oleh berbagai universitas negeri di Indonesia. Atas prakarsa Direktur Sekolah Vokasi UGM saat itu (Ir. Hotma Prawoto S, MT., IP-Md) perwakilan dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Universitas Brawijaya, dan Universitas Negeri Yogyakarta diminta menghadiri pertemuan khusus di Ruang Sidang SV 138 untuk membicarakan inisiasi pendirian Forum Komunikasi Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia.

Pertemuan ini menghasilkan 4 butir Nota Kesepakatan Bersama yaitu:

1. Membentuk Forum Komunikasi Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia (Forkom PTVI)
2. Melakukan koordinasi awal dengan semua Pendidikan Tinggi Vokasi yang dikoordinasi oleh Sekolah Vokasi UGM
3. Tujuan pembentukan forum komunikasi ini antara lain:
  - a. Mensinergikan penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi vokasi di berbagai universitas/institut di Indonesia
  - b. Memperjuangkan nomenklatur institusi penyelenggara pendidikan tinggi vokasi di Universitas/Institut di Indonesia
  - c. Mengusulkan kepada BAN PT untuk melakukan penyesuaian borang akreditasi yang cocok dengan ciri dan pola pendidikan tinggi vokasi
  - d. Sharing penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi di berbagai universitas/institut di Indonesia khususnya dalam rangka turut memberikan solusi bagi penyelesaian masalah-masalah bangsa
4. Menyelenggarakan pertemuan/musyawarah nasional pendirian Forum Komunikasi Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia (Forkom PTVI) selambat-lambatnya pada bulan September 2014 di UGM Yogyakarta.

Kesepakatan ini ditandatangani oleh:

1. Hotma Prawoto, MT., IP-Md (Universitas Gadjah Mada)
2. Antony Sihombing, MPD, Ph.D (Universitas Indonesia)
3. Wawan Oktariza, M,Si (Institut Pertanian Bogor)
4. Dwi Rahdiyanta, M.Pd (Universitas Negeri Yogyakarta)

---

<sup>9</sup> Narasumber: Jany F. Abidin Ketua Bidang 3 FPTVI, Bandung 25 Agustus 2018

5. Efraim Luturmas, MM (Universitas Brawijaya)

Selanjutnya, sebelum pelaksanaan Kongres I ini dilakukan koordinasi yang disebut sebagai pertemuan pra kongres. Pra Kongres I ini diadakan di Program Vokasi Universitas Indonesia, dengan dihadiri semua perwakilan dari UGM, UI, IPB, UB, dan UNY.

Akhirnya pada tanggal 28 Oktober 2014, dengan dukungan dari semua pemrakarsa/inisiator ini, Sekolah Vokasi UGM berhasil menyelenggarakan Kongres I, dengan hasil-hasil sebagai berikut:

1. Masa Bakti Pengurus Forkom PTVI adalah 1 tahun
2. Intitusi penyelenggara Kongres otomatis menjadi Pemimpin Forkom PTVI (Ketua dan Sekjen)
3. Wakil Ketua dipilih dari pimpinan institusi penyelenggara kongres berikutnya
4. Dari kongres ke kongres berikutnya minimal diadakan 1 kali pertemuan dalam bentuk rapat kerja
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dibahas dan disahkan dalam Rapat Kerja 2015 yang akan diselenggarakan di Lombok Utara
6. Hasil kongres I ini disampaikan kepada Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi sebagai bentuk kemitraan antara Forkom PTVI dan Kementerian Ristek dan Dikti

Kepengurusan FPTVI saat ini (2017/2018) memiliki 5 bidang yaitu:

1. Bidang 1 Kelembagaan --> Masalah kerjasama dengan pihak-pihak dunia industri
2. Bidang 2 Prodi/Rumpun Sejenis --> RPL, CP, dan Pengguna Lulusan
3. Bidang 3 Akreditasi/Sertifikasi --> Akreditasi BAN PT dan LAM dan sertifikasi kompetensi
4. Bidang 4 Kompetisi Mahasiswa --> kompetisi mahasiswa per bidang ilmu
5. Bidang 5 Jurnal dan Publikasi --> pembinaan pendirian jurnal dan publikasi terakreditasi internasional dan nasional

FPTVI mengadakan MUNAS dan Rapat Kerja setiap tahun sekali dengan format MUNAS di Jawa dan Rapat Kerja di luar Jawa. MUNAS pertama diselenggarakan di Sekolah Vokasi UGM, MUNAS kedua diselenggarakan di Program Vokasi UNIBRAW, MUNAS ketiga di Universitas Indonesia, dan MUNAS keempat diselenggarakan di Program Vokasi IPB. MUNAS kelima direncanakan akan diselenggarakan di Fakultas Vokasi UNAIR.

Ketua FPTVI Periode 2017/2018 adalah Dr. Ir. Arief Darjanto, M.Ec. (Direktur Program Vokasi IPB) dan Sekjenya adalah Dr. Wawan Oktariza (Wakil Dekan II Program Vokasi IPB).

## Kepustakaan

<http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/index.php/2016/10/31/revitalisasi-pendidikan-vokasi-menerapkan-sistem-321>

<http://ugmpress.ugm.ac.id/id/product/pertanian/penelitian-terapan>

<http://www.kopertis12.or.id/2017/02/10/pendidikan-tinggi-vokasi-cari-bentuk-jerman-menawarkan-dukungan.html>

<https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/DitlemkermaPanduanAKolehMasyarakat2014.pdf>

<https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/DitlemkermaPanduanAKolehMasyarakat2014.pdf>

Kebutuhan data ketenagakerjaan untuk pembangunan berkelanjutan, Presentation at the Economic and Social Council 2015 Integration Segment - "Achieving sustainable development through employment creation and decent work for all": Indonesia country level consultation," Jakarta, 24-25 February 2015, [http://www.ilo.org/jakarta/WCMS\\_346599/lang--en/index.htm](http://www.ilo.org/jakarta/WCMS_346599/lang--en/index.htm)

Klaus Schwab, 2017, the Fourth Industrial Revolution, Penguin Random House, New York

Konsep Link and Match: Fungsi Pendidikan Sebagai Pemasok Tenaga Kerja Siap Pakai, <https://ibnsukron.wordpress.com/2012/01/29/konsep-link-and-match-fungsi-pendidikan-sebagai-pemasok-tenaga-kerja-siap-pakai/>

Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 4/2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi

Perumusan SWOT Unsada @R Sasana Wiyata Unsada-Jakarta, 30 Juli 2015: <https://www.slideshare.net/DadangSolihin/perumusan-swot-dalam-rangka-agenda-revitalisasi-universitas-darma-persada-2015-2019>

Rakor Pengembangan Key Performance Indicators, R Rapat Sasana-Unsada, 29 Februari 2016, <https://www.slideshare.net/DadangSolihin/university-performance-measurement>

Seleksi Calon Rektor Universitas Darma Persada @R Sasana Wiyata Unsada-Jakarta, 19 Juni 2015: "Revitalisasi Universitas Darma Persada Visi, Misi dan Agenda Strategis Calon Rektor 2015 -2019"

## **LAMPIRAN**

- 1. Perkembangan Terkini Akreditasi Perguruan Tinggi, Dewan Eksekutif BANPT**
- 2. Akreditasi PT dan PRODI Vokasi berbasis SAPTO, Dr. Maman Abdurrohman**

# ***PERKEMBANGAN TERKINI AKREDITASI PERGURUAN TINGGI***

***DEWAN EKSEKUTIF BAN-PT***



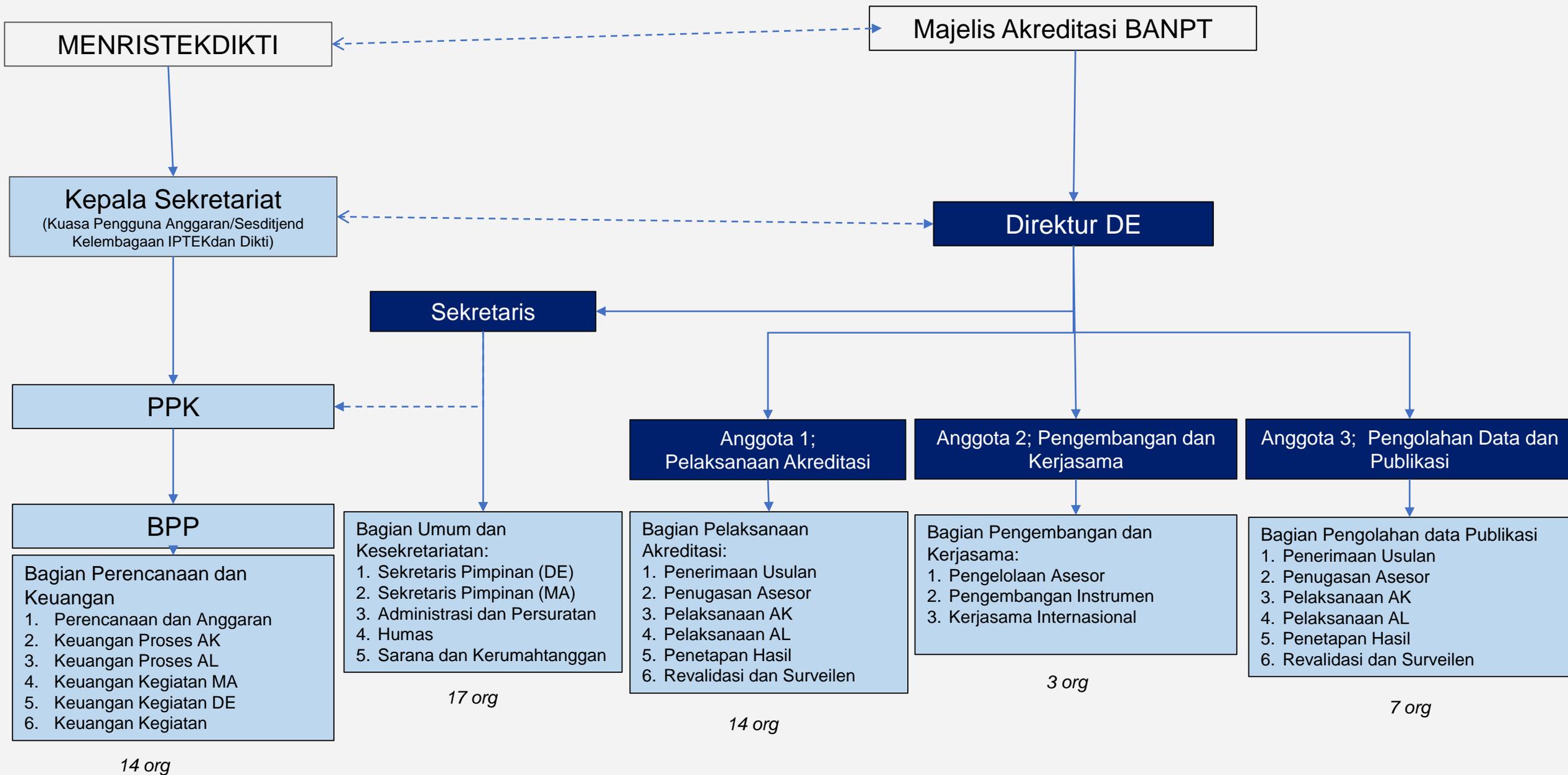
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI // 2018

# ORGANISASI Dewan Eksekutif BAN-PT

## Peraturan BAN-PT No.1 Tahun 2017

- Direktur,
- Sekretaris
- Divisi Pelaksanaan Akreditasi
- Divisi Data dan Publikasi
- Divisi Pengembangan dan Kerjasama
- **Sekretariat**

# STRUKTUR ORGANISASI





**DEWAN EKSEKUTIF BAN-PT**

# PERUBAHAN (UU 20/2003 s/d UU 12/2012) AKREDITASI DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

---

- Dari akreditasi sukarela  $\Rightarrow$  **wajib**
- Dari akreditasi program studi  $\Rightarrow$  akreditasi program studi dan akreditasi perguruan tinggi
- Dari sistem penjaminan mutu internal sukarela  $\Rightarrow$  **wajib**
- Dari badan akreditasi tunggal BAN-PT untuk akreditasi program studi dan akreditasi institusi  $\Rightarrow$  BAN-PT untuk akreditasi institusi dan LAM untuk akreditasi program studi

# PENGGERTIAN AKREDITASI

(Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016)

---

- Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi (Pasal 1 ayat 1)
- Akreditasi Program Studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi (Pasal 1 ayat 2)
- Akreditasi Perguruan Tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Perguruan Tinggi (Pasal 1 ayat 3)

# KEBIJAKAN AKREDITASI

(Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016)

---

- Luaran proses akreditasi dinyatakan dengan status akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Status akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi terdiri atas:
  - a. Terakreditasi
  - b. Tidak terakreditasi
- Peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi terdiri atas:
  - a. Terakreditasi baik
  - b. Terakreditasi baik sekali; dan
  - c. Terakreditasi unggul

# KELEMBAGAAN AKREDITASI

(Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016)

---



BAN-PT dibentuk oleh Menteri



BAN-PT merupakan badan nonstruktural di lingkungan Kementerian dan bertanggung jawab kepada Menteri



BAN-PT memiliki kemandirian dalam melakukan akreditasi Perguruan Tinggi

# INSTRUMEN AKREDITASI

(Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016)

---

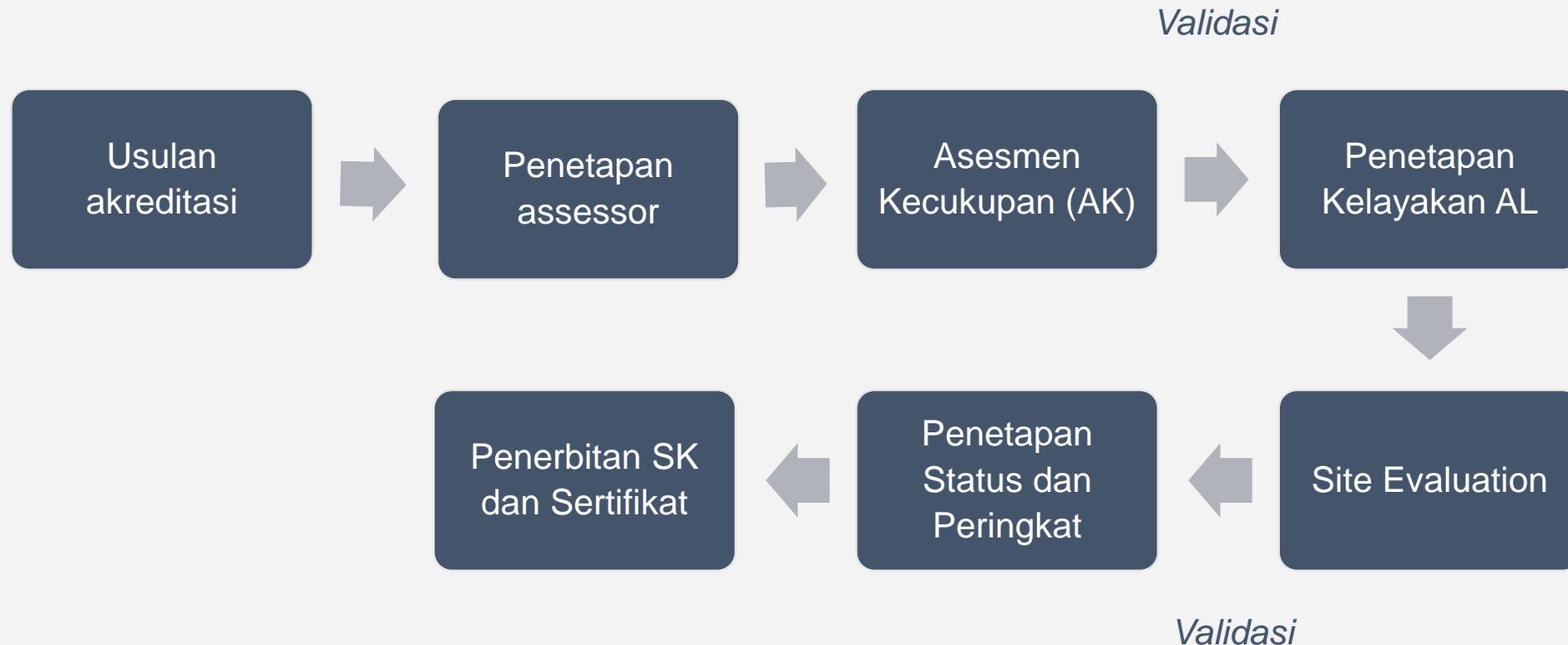
Instrumen akreditasi untuk Program Studi

Instrumen akreditasi untuk Perguruan Tinggi

Instrumen akreditasi Program Studi disusun berdasarkan:

- a. jenis pendidikan, yaitu vokasi, akademik, profesi;
- b. program pendidikan, yaitu program diploma, sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, profesi, spesialis, doktor, dan doktor terapan;
- c. modus pembelajaran, yaitu tatap muka dan jarak jauh; dan
- d. hal-hal khusus.

# PROSES AKREDITASI



*PT dan PS dapat melakukan Banding;  
Ditelaah dan ditetapkan oleh MA*

# **Surveilen**

## **Bentuk**

- 1. Ketidakpuasan Hasil Akreditasi**
- 2. Alih Bentuk**
- 3. Monev, laporan masyarakat, pemerintah, DE menganggap perlu**

# OUTLINE

*PERKEMBANGAN TERKINI AKREDITASI PERGURUAN TINGGI*

**1**

*PENDAHULUAN*

**2**

*KRITERIA LAMA VS BARU*

**3**

*INSTRUMEN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI (IAPT 3.0)*

*> PENDAHULUAN*

*> LKR*

*> LED*

*> PENILAIAN*

*> STATUS*

*> ISU-ISU*

# PENDAHULUAN

PERKEMBANGAN TERKINI AKREDITASI PERGURUAN TINGGI



## Instrumen Lama

Berbasis boring

- Mudah untuk scale up
- Cenderung mekanistik

Berorientasi input

- Kurang terkait dgn quality

Generik

- Satu untuk semua

Tidak terkait dgn proses CQI

- adhoc, tidak membangun budaya

Mudah direkayasa

## Instrumen Baru

Berbasis Evaluasi Diri

- Menentukan kelemahan dan kekuatan

Berorientasi outputs dan outcome

Lebih spesifik

Sebagai bagian integrated dari CQI

Unik perindividu

- Tidak mudah direkayasa

Tidak mudah scale up

Memerlukan kemampuan lebih tinggi dari asesor

# LATAR BELAKANG

## INSTRUMEN OUTDATED

*PERKEMBANGAN TERKINI AKREDITASI PERGURUAN TINGGI*

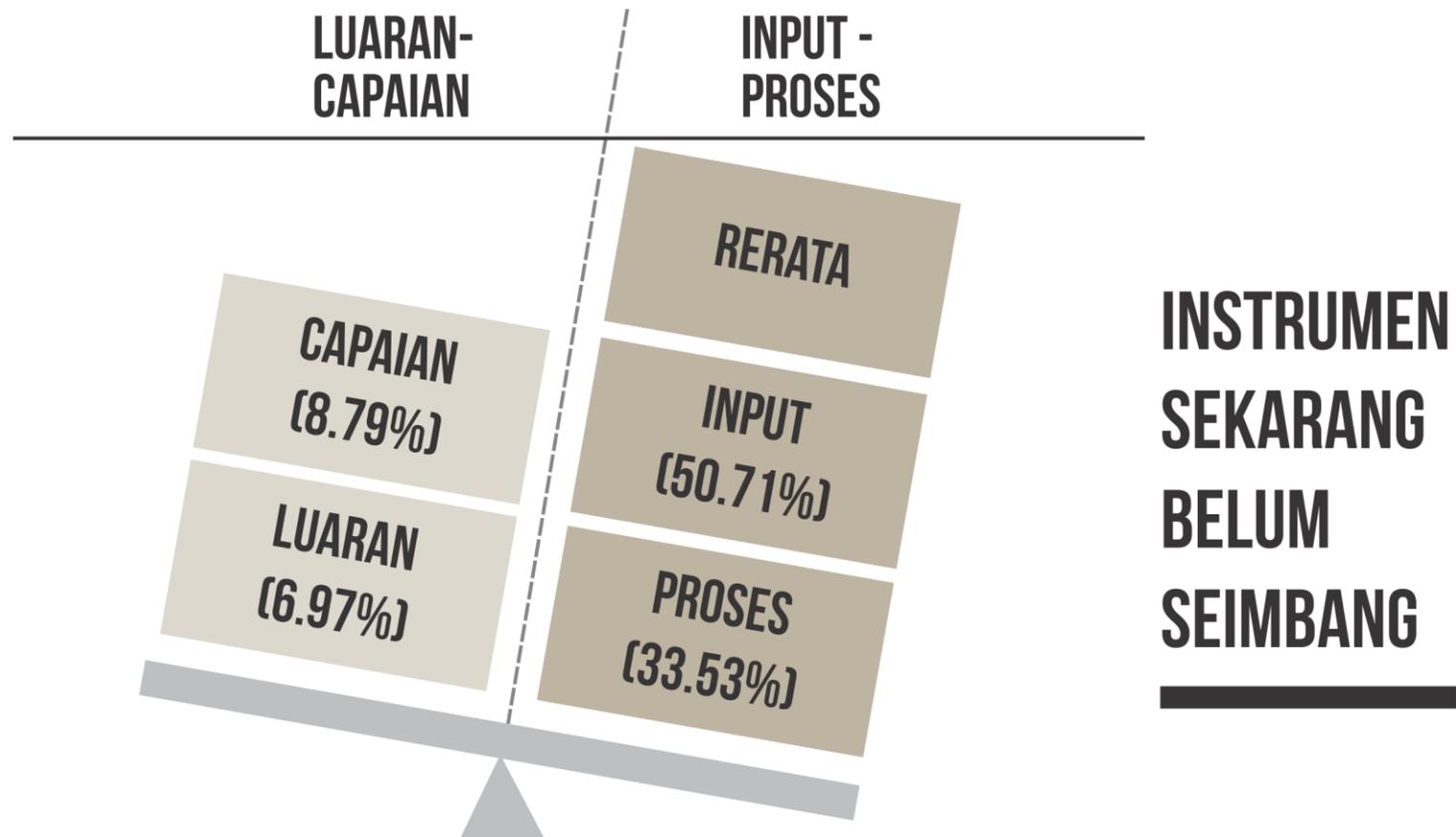
INSTRUMEN	TAHUN
DIPLOMA	2009
SARJANA	2008
MASTER	2009
DOKTOR	2009
INSTITUSI	2011

GAP 7-9 TAHUN

**2018**

# LATAR BELAKANG PARADIGMA

*PERKEMBANGAN TERKINI AKREDITASI PERGURUAN TINGGI*



# LATAR BELAKANG

## SPEKIFIKASI

*PERKEMBANGAN TERKINI AKREDITASI PERGURUAN TINGGI*

**INSTRUMEN**  
**PERMENRISTEK DIKTI**  
**NO. 32 2016 AYAT 4**

---

JENIS PENDIDIKAN (VOKASI, AKADEMIK, PROFESI)

PROGRAM PENDIDIKAN

MODUS PEMBELAJARAN

HAL-HAL KHUSUS

# LATAR BELAKANG

## ISU LAIN

*PERKEMBANGAN TERKINI AKREDITASI PERGURUAN TINGGI*

**ISU-ISU LAIN  
(ASSESSMENT,  
COPY-PASTE)**

**KOMPONEN  
PERFORMA DALAM  
2 DOKUMEN IAPT 3.0**

# KRITERIA LAMA VS BARU

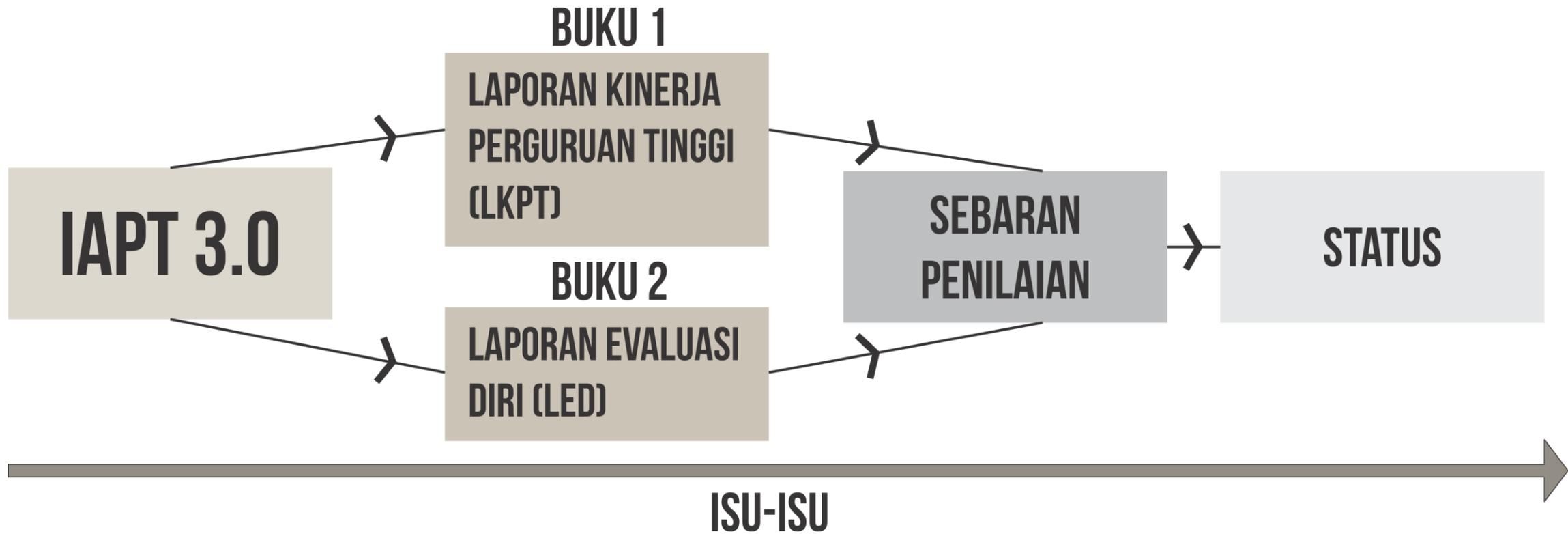
PERKEMBANGAN TERKINI AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

	<b>STANDAR &amp; KRITERIA LAMA</b>	<b>STANDAR &amp; KRITERIA BARU</b>
<b>1</b>	<b>VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN</b>	<b>VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN</b>
<b>2</b>	<b>TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, &amp; PENJAMINAN MUTU</b>	<b>TATA PAMONG, MANAJEMEN, &amp; KERJASAMA</b>
<b>3</b>	<b>MAHASISWA &amp; LULUSAN</b>	<b>MAHASISWA</b>
<b>4</b>	<b>SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>SUMBER DAYA MANUSIA</b>
<b>5</b>	<b>KURIKULUM, PEMBELAJARAN, &amp; ATMOSFIR AKADEMIK</b>	<b>PENGAJARAN &amp; PEMBELAJARAN</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN, PRASARANA, SARANA &amp; SISTEM INFORMASI</b>	<b>KEUANGAN, ASET, &amp; FASILITAS</b>
<b>7</b>	<b>PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, &amp; KERJASAMA</b>	<b>PENELITIAN</b>
<b>8</b>		<b>PELAYANAN UMUM</b>
<b>9</b>		<b>LUARAN &amp; CAPAIAN</b>

# IAPT 3.0

## PENDAHULUAN

PERKEMBANGAN TERKINI AKREDITASI PERGURUAN TINGGI



# IAPT 3.0

## LAPORAN KINERJA PERGURUAN TINGGI (LKPT)

*PERKEMBANGAN TERKINI AKREDITASI PERGURUAN TINGGI*

The logo for LKPT (Laporan Kinerja Perguruan Tinggi) is a stylized, semi-circular shape with a light beige background and a dark grey border. The letters 'LKPT' are written in a bold, dark grey font across the center of the shape.

**LKPT**

**1. TATA PAMONG, TATA KELOLA, & KERJASAMA**

---

**2. MAHASISWA**

---

**3. SUMBER DAYA MANUSIA**

---

**4. KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA**

---

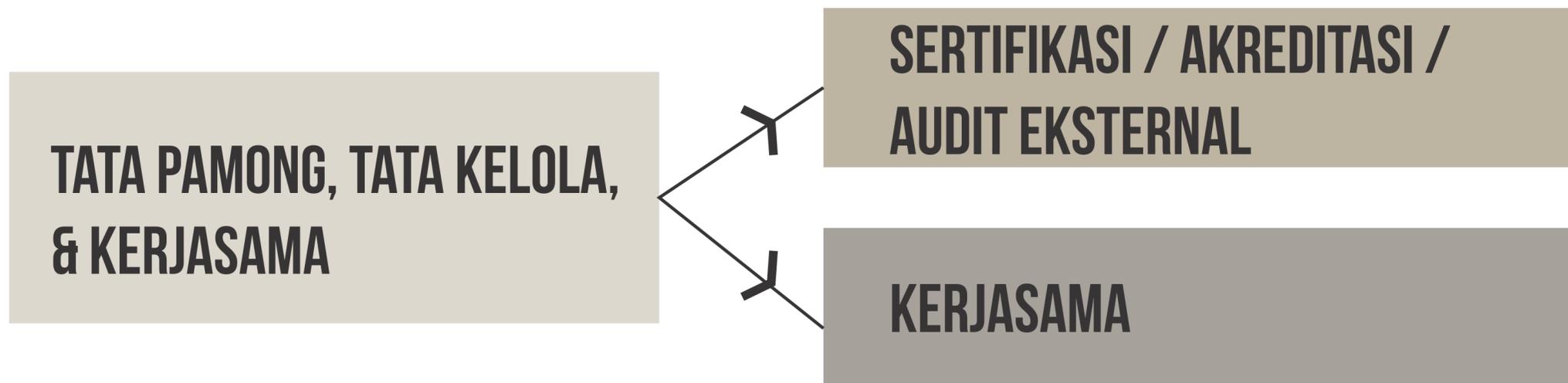
**5. LUARAN & CAPAIAN**

---

# IAPT 3.0

## LKPT 1

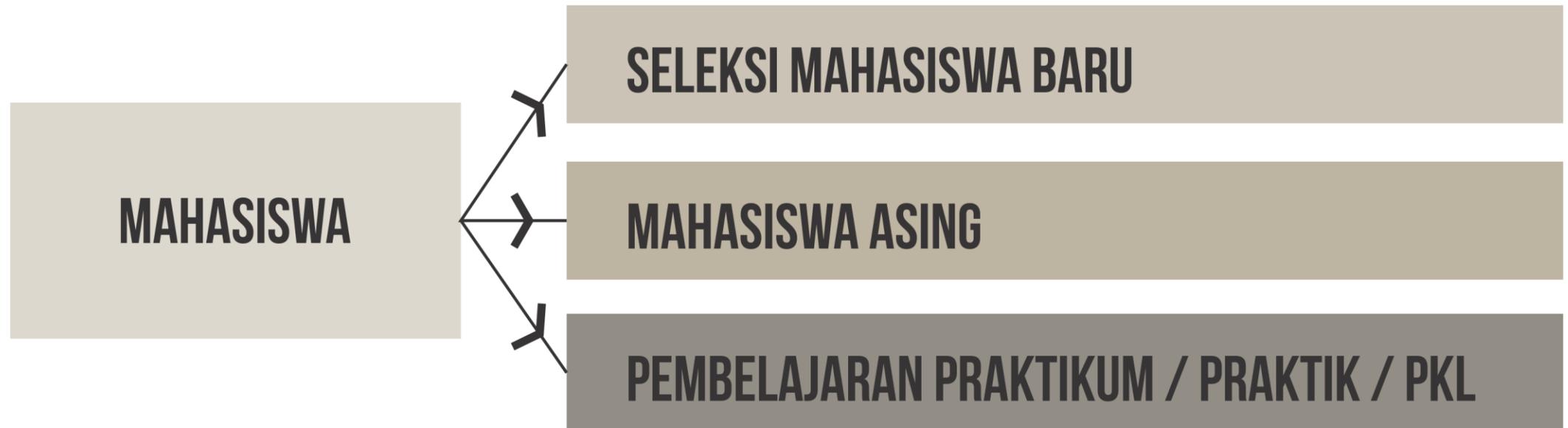
*PERKEMBANGAN TERKINI AKREDITASI PERGURUAN TINGGI*



# IAPT 3.0

## LKPT 2

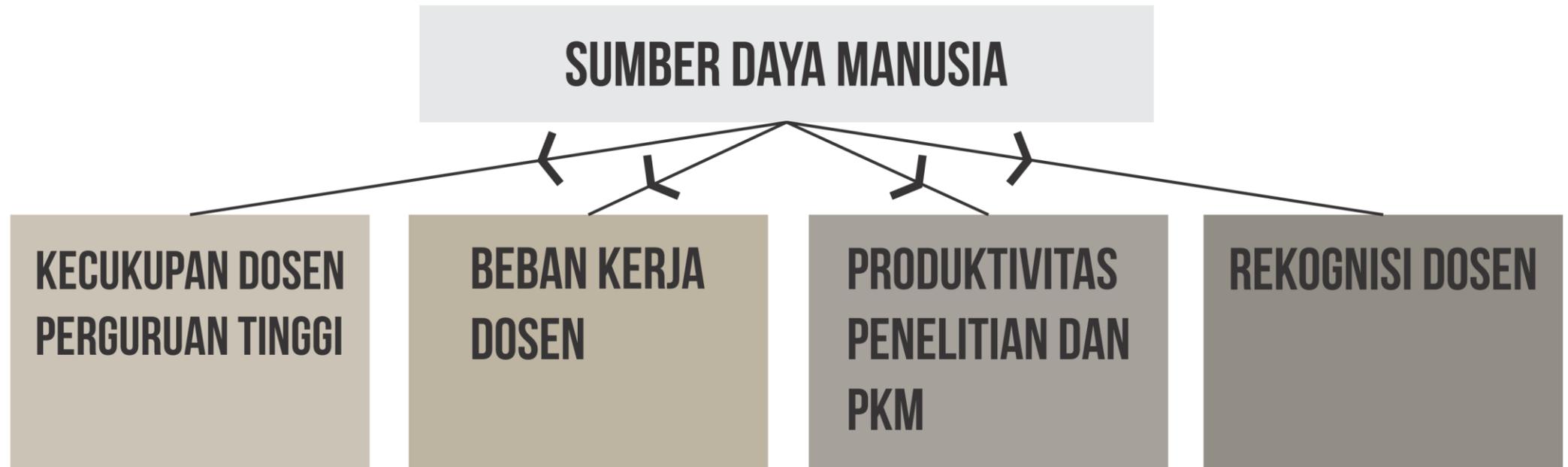
*PERKEMBANGAN TERKINI AKREDITASI PERGURUAN TINGGI*



# IAPT 3.0

## LKPT 3

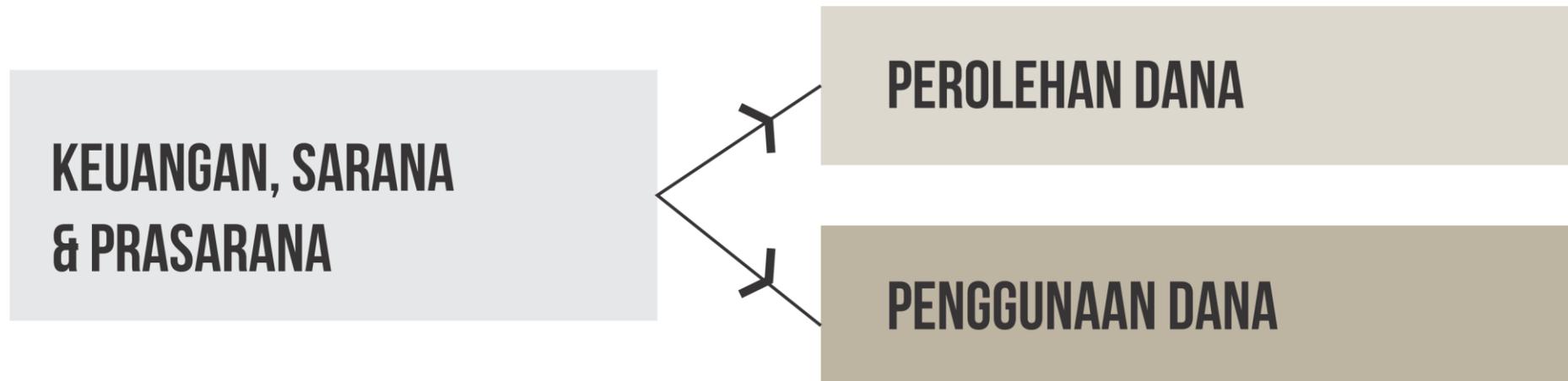
*PERKEMBANGAN TERKINI AKREDITASI PERGURUAN TINGGI*



# IAPT 3.0

## LKPT 4

*PERKEMBANGAN TERKINI AKREDITASI PERGURUAN TINGGI*



# IAPT 3.0

## LKPT 5

PERKEMBANGAN TERKINI AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

<b>A</b>	INDEKS PRESTASI MAHASISWA & SERTIFIKAT KOMPETENSI / PROFESI / INDUSTRI	<b>B</b>	PRESTASI AKADEMIK / NON-AKADEMIK MAHASISWA	<b>C</b>	EFEKTIVITAS DAN PRODUKTIVITAS PENDIDIKAN
<b>D</b>	DAYA SAING LULUSAN	<b>E</b>	KINERJA LULUSAN	<b>F</b>	PUBLIKASI KARYA ILMIAH
<b>G</b>	SITASI ILMIAH	<b>H</b>	PRODUK / JASA YANG DIADOPSI OLEH INDUSTRI / MASYARAKAT	<b>I</b>	LUARAN PENELITIAN
<b>J</b>	PUBLIKASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	<b>K</b>	LUARAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT		

# IAPT 3.0

## LAPORAN EVALUASI DIRI (LED)

*PERKEMBANGAN TERKINI AKREDITASI PERGURUAN TINGGI*

**A. CAKUPAN EVALUASI DIRI**

---

**B. KRITERIA**

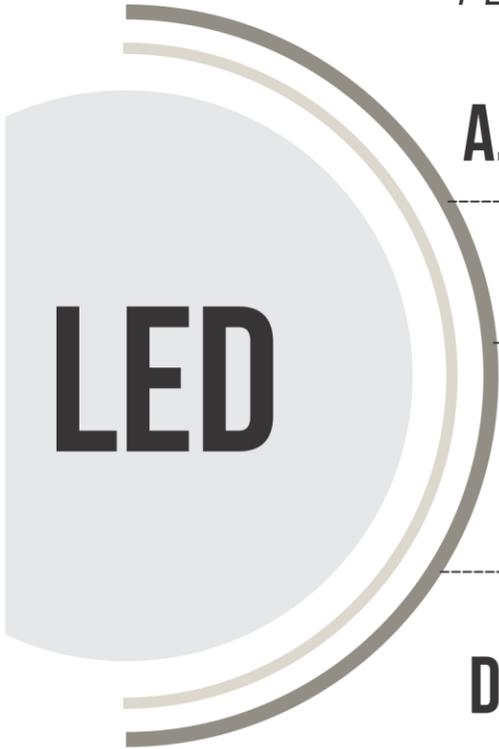
---

**C. ANALISIS DAN PENETAPAN PROGRAM  
PENGEMBANGAN INSTITUSI**

---

**D. PENUTUP**

---



**LED**

# IAPT 3.0

## LED A

*PERKEMBANGAN TERKINI AKREDITASI PERGURUAN TINGGI*



# IAPT 3.0

## LED B

PERKEMBANGAN TERKINI AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

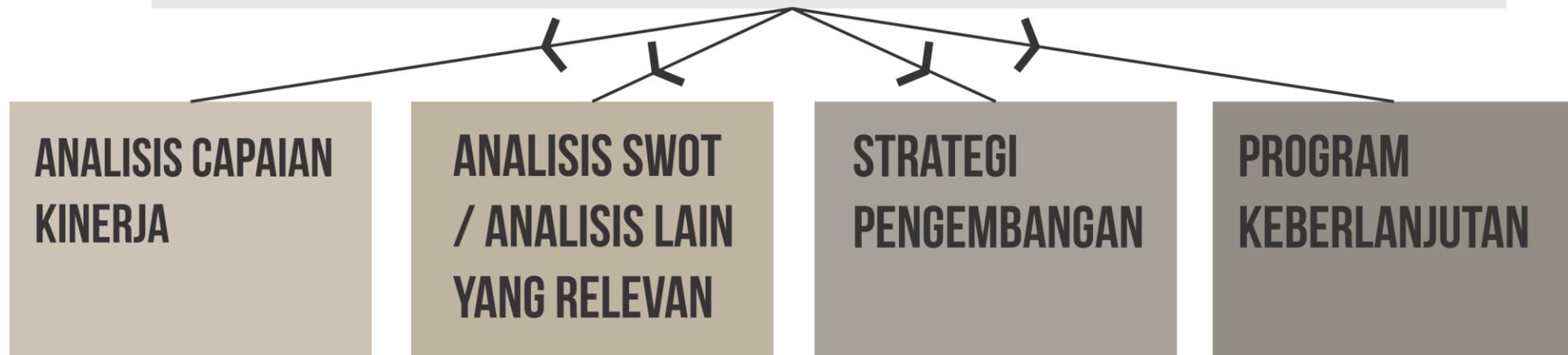
<b>KRITERIA</b>	<b>A</b>	INDEKS PRESTASI MAHASISWA & SERTIFIKAT KOMPETENSI / PROFESI / INDUSTRI	<b>B</b>	PRESTASI AKADEMIK / NON-AKADEMIK MAHASISWA	<b>C</b>	EFEKTIVITAS DAN PRODUKTIVITAS PENDIDIKAN
	<b>D</b>	DAYA SAING LULUSAN	<b>E</b>	KINERJA LULUSAN	<b>F</b>	PUBLIKASI KARYA ILMIAH
	<b>G</b>	SITASI ILMIAH	<b>H</b>	PRODUK / JASA YANG DIADOPSI OLEH INDUSTRI / MASYARAKAT	<b>I</b>	LUARAN PENELITIAN

# IAPT 3.0

## LED C

*PERKEMBANGAN TERKINI AKREDITASI PERGURUAN TINGGI*

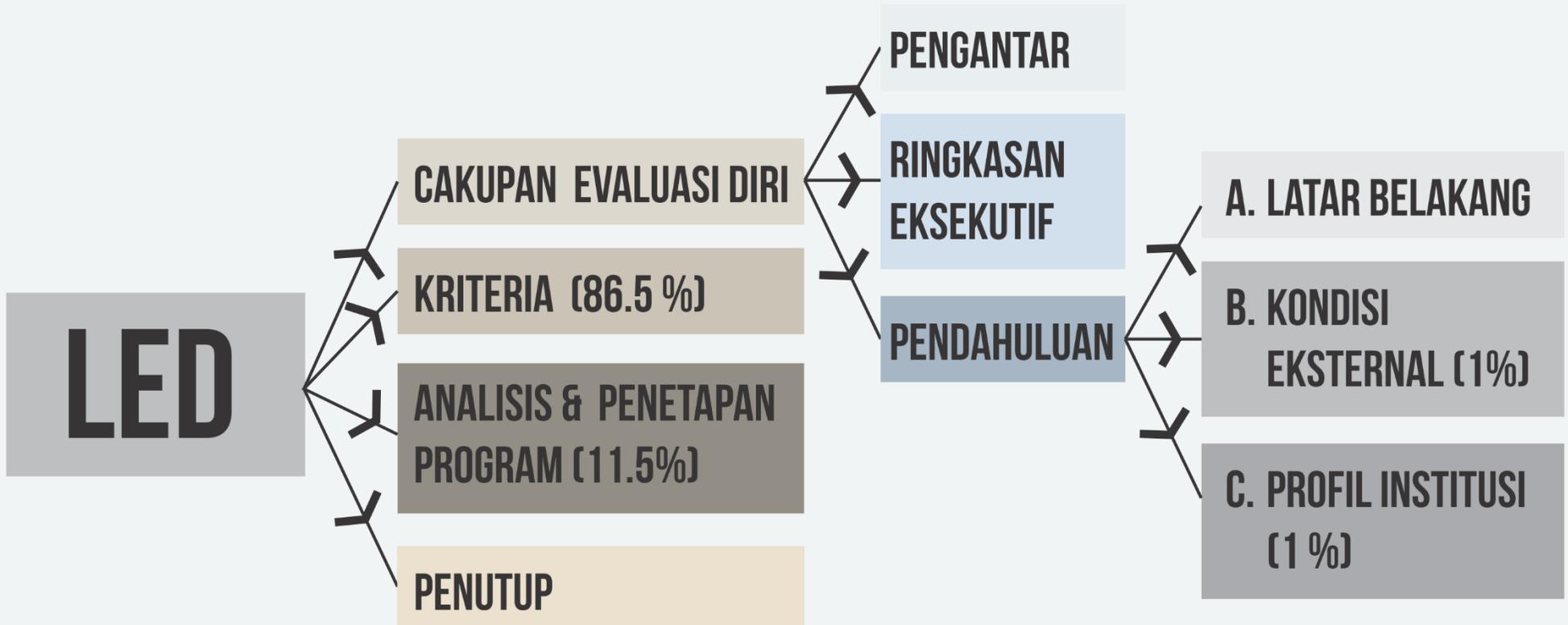
### ANALISIS DAN PENETAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN INSTITUSI



# PENILAIAN

PERKEMBANGAN TERKINI AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

## SEBARAN PENILAIAN LED



# STATUS

*PERKEMBANGAN TERKINI AKREDITASI PERGURUAN TINGGI*

	<b>RENTANG SKOR APT</b>	<b>STATUS APT</b>
<b>1</b>	<b>SKOR = 361</b>	<b>UNGGUL</b>
<b>2</b>	<b>300 &lt; SKOR = 360</b>	<b>BAIK SEKALI</b>
<b>3</b>	<b>200 = SKOR = 300</b>	<b>BAIK</b>
<b>4</b>	<b>SKOR &lt; 200</b>	<b>TIDAK TERAKREDITASI</b>

# ISU-ISU

PERKEMBANGAN TERKINI AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

## ISU-ISU UTAMA

PERSETUJUAN  
BAN-PT

KEBIJAKAN

KESIAPAN INSTRUMEN &  
SISTEM ONLINE

PEMBENTUKAN TIM

KOMPETENSI ASESSOR

PENGEMBANGAN  
ASESSOR

KESIAPAN PESERTA  
AKREDITASI

SOSIALISASI DAN  
TRAINING



*BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI // 2018*

**TERIMA KASIH**

# AKREDITASI PT DAN PRODI VOKASI BERBASIS SAPTO

OLEH : DR. MAMAN ABDUROHMAN

Bandung, 25 Agustus 2018

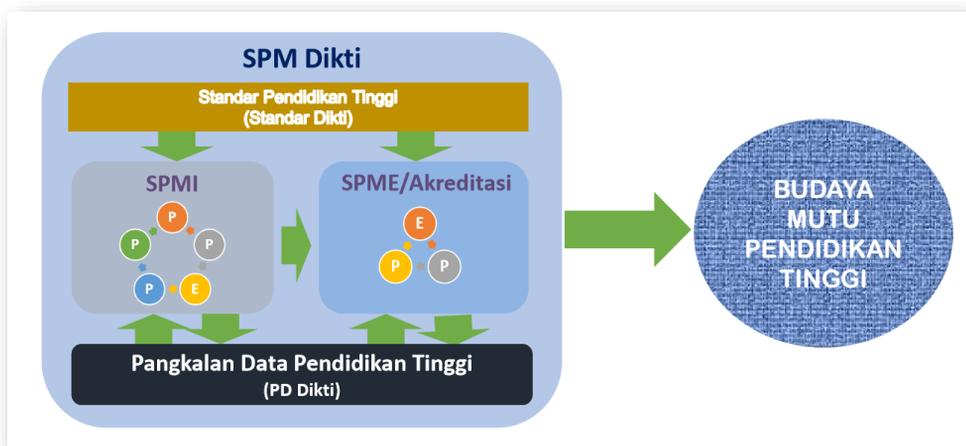
## QUOTES[1]

- "Quality is not an act; it is a habit" – Aristotle
- "Quality is never an accident; it is always the result of high intention, sincere effort, intelligent direction and skillful execution; it represents the wise choice of many alternatives" - William A. Foster

## DASAR HUKUM SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI (SPM DIKTI)[2]

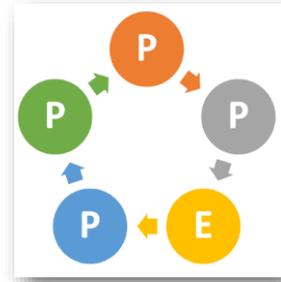
1. UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti 32/2016 tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
4. Permenristekdikti 61/2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
5. Permenristekdikti 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Permenristekdikti 100/2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
7. Per-BAN-PT Nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
8. Per-BAN-PT Nomor 4 tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi
9. Per-BAN-PT Nomor 6 tahun 2017 tentang Pedoman Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Satu Program Studi

## SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI



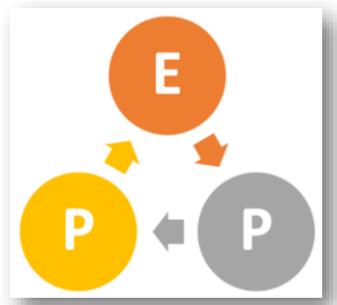
## SIKLUS SPMI

- **Penetapan** Standar Pendidikan Tinggi;
- **Pelaksanaan** Standar Pendidikan Tinggi;
- **Evaluasi** pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
- **Pengendalian** pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan
- **Peningkatan** Standar Pendidikan Tinggi.



## SIKLUS SPME

- Tahap **Evaluasi** Data dan Informasi;
- Tahap **Penetapan** Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi; dan
- Tahap **Pemantauan** dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.



## SISTEM AKREDITASI

- Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (UU 12/2012 Pasal 55 ayat 4)
- Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri. (UU 12/2012 Pasal 55 ayat 5)

## TUJUAN AKREDITASI

- Akreditasi merupakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - Menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
  - Menjamin mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi secara eksternal baik bidang akademik maupun non akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat

## PELAKSANAAN AKREDITASI

- Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- Akreditasi Program Studi (APS) sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.
- Sebelum LAM terbentuk, akreditasi Program Studi dilakukan oleh BAN-PT.

## BAN-PT DAN LAM

- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri.
- Lembaga Akreditasi Mandiri, yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan akreditasi Program Studi secara mandiri.

## AKREDITASI INTERNASIONAL

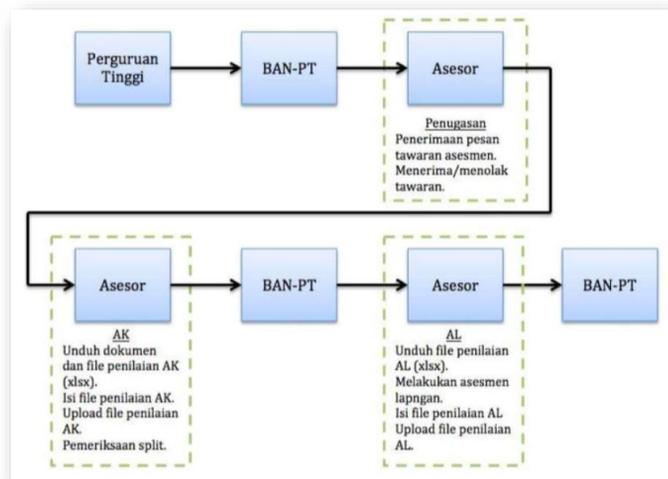


- Akreditasi Internasional dapat dilakukan apabila sesuai dengan Visi dan Misi perguruan tinggi/program studi
- Akreditasi Internasional dapat dilakukan apabila perguruan tinggi/program studi telah terakreditasi BAN-PT/LAM
- Lembaga akreditasi yang melakukan akreditasi terhadap perguruan tinggi/program studi adalah lembaga yang mempunyai reputasi dan diakui secara internasional
- Proses akreditasi internasional dapat dimulai apabila perguruan tinggi/program studi telah mendapatkan izin melakukan proses akreditasi internasional dari BAN-PT

Contoh : IABEE, ABET dan ASIIN

## SISTEM AKREDITASI PERGURUAN TINGGI ONLINE (SAPTO) DAN PERAN ASESOR

- SAPTO diterapkan mulai 1 Juni 2017
- Instrumen yang digunakan masih instrumen lama (7 Standar)



## INSTRUMEN AKREDITASI

- Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi.
- Instrumen akreditasi terdiri atas:
  - instrumen akreditasi untuk Program Studi; dan
  - instrumen akreditasi untuk Perguruan Tinggi.
- Instrumen akreditasi Program Studi disusun berdasarkan:
  - Jenis pendidikan, yaitu vokasi, akademik, profesi;
  - Program pendidikan, yaitu program diploma, sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, profesi, spesialis, doktor, dan doktor terapan;
  - Modus pembelajaran, yaitu tatap muka dan jarak jauh; dan
  - Hal-hal khusus.

## KELENGKAPAN INSTRUMEN AKREDITASI

BUKU I – NASKAH AKADEMIK AKREDITASI PROGRAM STUDI/PERGURUAN TINGGI

BUKU II – KRITERIA DAN PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI/PERGURUAN TINGGI

BUKU IIIA – DOKUMEN KINERJA PROGRAM STUDI/PERGURUAN TINGGI atau nama lain yang relevan

BUKU IIIB – LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI/PERGURUAN TINGGI atau nama lain yang relevan

## KELENGKAPAN INSTRUMEN AKREDITASI

BUKU IVA – PANDUAN PENGISIAN DOKUMEN KINERJA PROGRAM STUDI/PERGURUAN TINGGI atau nama lain yang relevan

BUKU IVB – PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI/PERGURUAN TINGGI atau nama lain yang relevan

BUKU VA – PEDOMAN PENILAIAN DOKUMEN KINERJA PROGRAM STUDI/ PERGURUAN TINGGI atau nama lain yang relevan

BUKU VB – PEDOMAN PENILAIAN LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI/ PERGURUAN TINGGI atau nama lain yang relevan

## KELENGKAPAN INSTRUMEN AKREDITASI

BUKU VIA – MATRIKS PENILAIAN DOKUMEN KINERJA PROGRAM STUDI/ PERGURUAN TINGGI atau nama lain yang relevan

BUKU VIB – MATRIKS PENILAIAN LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI/ PERGURUAN TINGGI atau nama lain yang relevan

BUKU VIB – MATRIKS PENILAIAN LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI/ PERGURUAN TINGGI atau nama lain yang relevan

## DIMENSI PENILAIAN (PER-BAN-PT NO.4/2017)

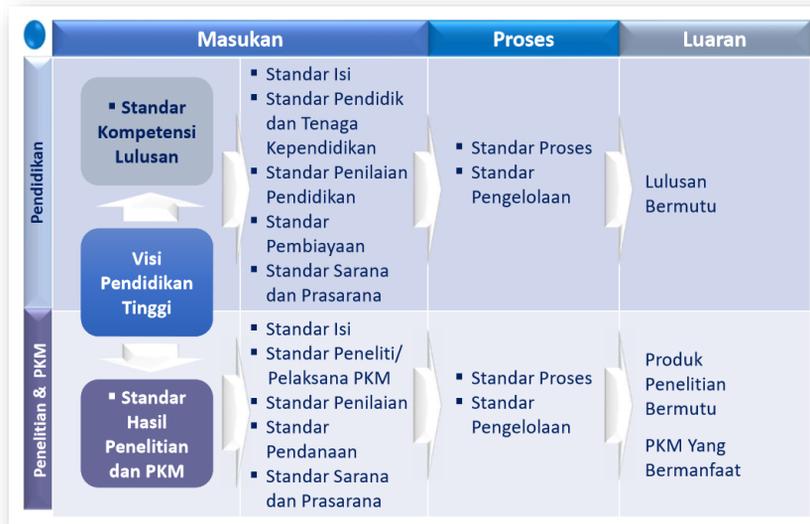
1. **mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola**: meliputi integritas visi dan misi, kepemimpinan (leadership), sistem manajemen sumberdaya, kemitraan strategis (strategic partnership), dan SPMI

2. **mutu dan produktivitas luaran (outputs), capaian (outcomes), dan dampak (impacts)**: berupa kualitas lulusan, produk ilmiah dan inovasi, serta kemanfaatan bagi masyarakat

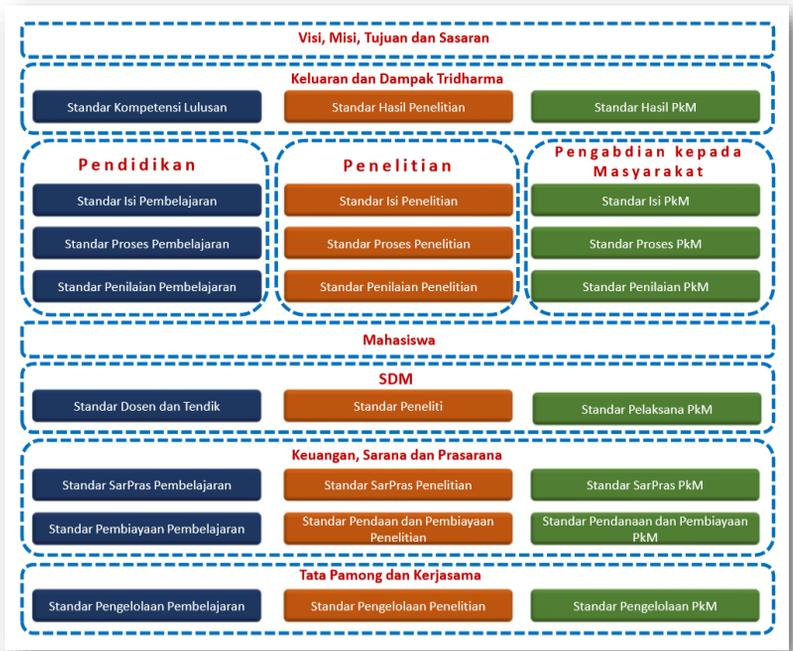
3. **mutu proses**: mencakup proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan suasana akademik

4. **kinerja mutu input**: meliputi sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), mahasiswa, kurikulum, sarana prasarana, keuangan (pembiayaan dan pendanaan)

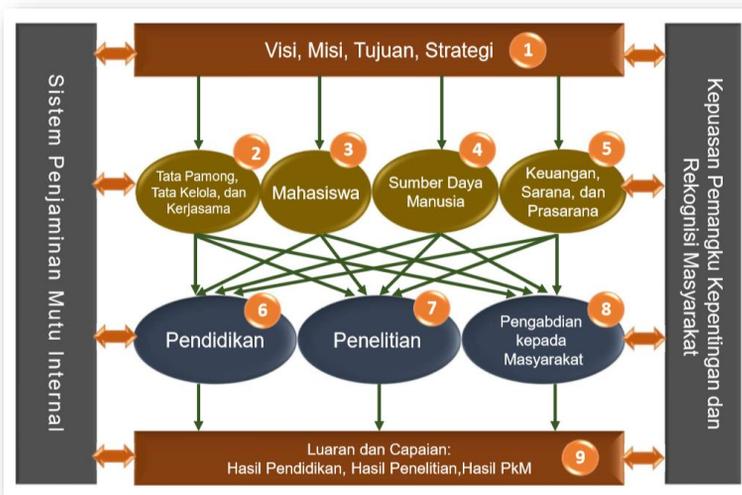
## KERANGKA PIKIR SN DIKTI



# KETERKAITAN SN DIKTI DAN KRITERIA AKREDITASI



# KRITERIA AKREDITASI MENGACU PADA SN DIKTI



## PERBANDINGAN STD LAMA DAN BARU

	<b>STANDAR &amp; KRITERIA LAMA</b>	<b>STANDAR &amp; KRITERIA BARU</b>
1	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
2	TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, & PENJAMINAN MUTU	TATA PAMONG, MANAJEMEN, & KERJASAMA
3	MAHASISWA & LULUSAN	MAHASISWA
4	SUMBER DAYA MANUSIA	SUMBER DAYA MANUSIA
5	KURIKULUM, PEMBELAJARAN, & ATMOSFIR AKADEMIK	PENGAJARAN & PEMBELAJARAN
6	PEMBIAYAAN, PRASARANA, SARANA & SISTEM INFORMASI	KEUANGAN, ASET, & FASILITAS
7	PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, & KERJASAMA	PENELITIAN
8		PELAYANAN UMUM
9		LUARAN & CAPAIAN

## GAMBARAN UMUM INSTRUMEN BARU

## PEMBERLAKUAN INSTRUMENT BARU

Instrumen Akreditasi Perguruan  
Tinggi (IAPT) : 1 Oktober 2018

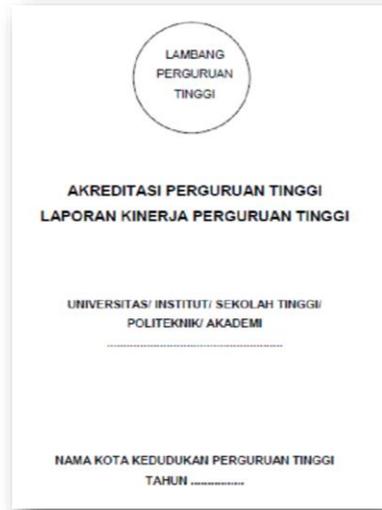
Instrumen Akreditasi Program  
Studi (IAPS) : 1 Januari 2019

## LAPORAN YANG DISUBMIT IAPT

Laporan Evaluasi Diri  
(LED)

Laporan Kinerja  
Perguruan Tinggi (LKPT)

## LED DAN LKPT



## LAPORAN EVALUASI DIRI (LED)

## ISI LED

IDENTITAS PERGURUAN TINGGI  
 IDENTITAS TIM PENYUSUN LED  
 KATA PENGANTAR  
 RINGKASAN EKSEKUTIF  
**BAB I. PENDAHULUAN**  
 A. DASAR PENYUSUNAN  
 B. TIM PENYUSUN DAN TANGGUNGJAWABNYA  
 C. MEKANISME KERJA PENYUSUNAN ED  
**BAB II. LAPORAN EVALUASI DIRI**  
 A. KONDISI EKSTERNAL  
 B. PROFIL INSTITUSI  
 C. KRITERIA  
 C.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi  
 C.2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama  
 C.3. Mahasiswa  
 C.4. Sumber Daya Manusia  
 C.5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana  
 C.6. Pendidikan  
 C.7. Penelitian  
 C.8. Pengabdian kepada Masyarakat  
 C.9. Luaran dan Capaian Tridharma  
 D. ANALISIS DAN PENETAPAN PROGRAM  
 PENGEMBANGAN  
**BAB III. PENUTUP**  
 LAMPIRAN

## CAKUPAN LED

### Latar Belakang

- Memuat dasar penyusunan, tim penyusun dan tanggung jawabnya, dan mekanisme kerja penyusunan LED.

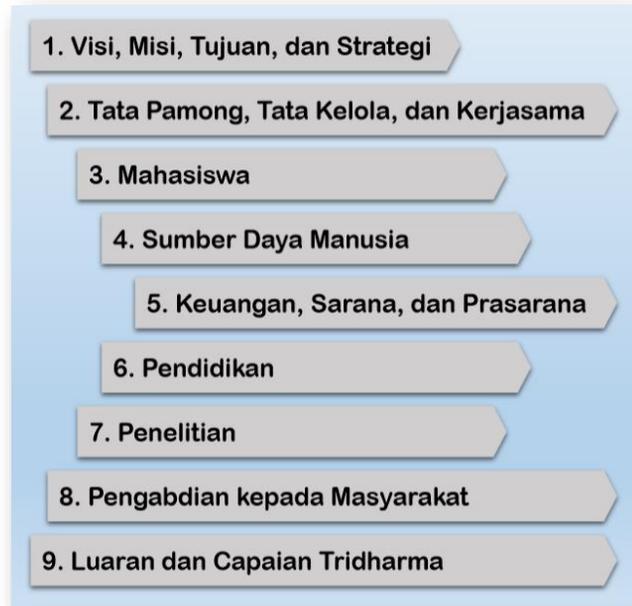
### Kondisi Eksternal

- Terdiri dari lingkungan makro dan lingkungan mikro ditingkat lokal, nasional, dan internasional.
- Lingk. makro mencakup aspek politik, ekonomi, kebijakan, sosial, budaya, perkembangan IPTEKS.
- Lingk. mikro mencakup aspek pesaing, pengguna lulusan, sumber calon mahasiswa, sumber calon dosen, sumber tendik, e-Learning, pend. jarak jauh, *Open Course Ware*, kebutuhan DUDI dan masyarakat, mitra, dan aliansi.
- PT perlu menganalisis aspek-aspek yang relevan dan dapat mempengaruhi eksistensi dan pengembangan institusi.

### Profil Institusi

- Berisi deskripsi sejarah institusi, visi, misi, tujuan, sasaran dan tata nilai, organisasi (fakultas, lembaga, dan program studi), mahasiswa dan lulusan, sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), keuangan, sarana dan prasarana, sistem penjaminan mutu internal, dan serta kinerja perguruan tinggi, yang disajikan secara ringkas dan mengemukakan hal-hal yang paling penting.

## KRITERIA LED



## STRUKTUR PENULISAN



# INDIKATOR KINERJA UTAMA LED

## 2. TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA

### A. Tata Pamong dan Tata Kelola

- Ketersediaan dokumen formal sistem tata pamong dan tata kelola untuk menyusun arah strategis sesuai dengan konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta memitigasi potensi risiko.
- Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas pokok dan fungsinya.
- Ketersediaan bukti yang sah terkait praktek baik perwujudan GUG mencakup 5 pilar yaitu: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan berkeadilan.

### B. Kepemimpinan

Ketersediaan dokumen legal dan bukti yang sah efektivitas kepemimpinan yang mencakup 3 aspek berikut:

- Kepemimpinan Operasional.
- Kepemimpinan Organisasional.
- Kepemimpinan Publik.

### C. Pengelolaan

- Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penempatan personil (*staffing*), pengarahan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*).
- Ketersediaan dokumen formal dan bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan, mencakup aspek: **pendidikan, pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, kemahasiswaan, penelitian, PkM, SDM, Keuangan, Sarpras, SPM, dan Kerjasama.**
- Ketersediaan dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap RENSTRA (perencanaan finansial dan sumberdaya, pengelolaan dan pengendalian risiko, kepatuhan terhadap peraturan, konflik kepentingan, pelaporan dan audit).

# TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA

## D. Sistem Penjaminan Mutu

- Dokumen formal pengembangan SPMPT, minimal: Dokumen formal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu internal.
- Dokumen mutu: pernyataan komitmen mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu dan dokumen lain yang diperlukan.
- Rencana penjaminan mutu: strategi, kebijakan, pemberdayaan para pemangku kepentingan yang merupakan bagian dari rencana jangka menengah maupun jangka panjang.
- Bukti sah pelaksanaan penjaminan mutu (PPEPP).
- Bukti sah pelaksanaan monev penjaminan mutu: terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan.
- Bukti sah sistem perekaman dan dokumentasi mutu, serta publikasi hasil penjaminan mutu internal kepada para pemangku kepentingan.
- Ketersediaan bukti sah terkait praktek baik pengembangan budaya mutu.

## Hasil analisis data dari LKPT terkait:

- Jenis dan lingkup audit keuangan eksternal yang dimiliki oleh perguruan tinggi (**Tabel 1.a. LKPT**).
- Jenis dan lingkup sertifikasi/akreditasi eksternal yang dimiliki oleh perguruan tinggi (**Tabel 1.a. LKPT**).
- Perolehan status akreditasi dan peringkat terakreditasi BAN PT untuk seluruh program studi (**Tabel 1.b. LKPT**).

## E. Kerjasama

- Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monev kepuasan mitra kerjasama.
- Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai VMTS.
- Ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan kerjasama.
- Ketersediaan bukti monev pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan kepuasan mitra, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian VMTS.

## 3. MAHASISWA

### Hasil analisis data dari LKPT terkait:

- Seleksi Mahasiswa Baru: rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi, dan persentase jumlah pendaftar yang lulus seleksi terhadap jumlah yang mendafta ulang (**Tabel 2.a LKPT**).
- Mahasiswa Asing: rasio jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa (**Tabel 2.b. LKPT**).

## 4. DOSEN

### Hasil analisis data dari LKPT terkait:

#### Profil Dosen

- Kecukupan Dosen Perguruan Tinggi (**Tabel 3.a.1 LKPT**).
- Jabatan Fungsional Dosen (**Tabel 3.a.2 LKPT**).
- Sertifikasi Profesi Dosen (**Tabel 3.a.3 LKPT**).
- Dosen Tidak Tetap (**Tabel 3.a.4 LKPT**).
- Beban Kerja Dosen (**Pendidikan, Penelitian, dan PkM**), (**Tabel 3.b, Tabel 3.c.1, dan Tabel 3.c.2 LKPT**).

#### Kinerja dosen

- Produktivitas Penelitian dan PkM (**Tabel 3.c.1 dan Tabel 3.c.2 LKPT**).
- Rekognisi Dosen (**Tabel 3.d LKPT**).

## 5. KEUANGAN, SARANA, PRASARANA

### KEUANGAN

Analisis kecukupan, proporsi, dan keberlanjutan dari perolehan dana (**Tabel 4.a LKPT**) dan penggunaan dana (**Tabel 4.b LKPT**).

### KECUKUPAN, AKSESIBILITAS, DAN MUTU PRASARANA

Kecukupan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, kesiap pakaian mencakup: fasilitas dan peralatan untuk PBM, Penelitian, dan PkM. Mengacu kepada SN DIKTI Pasal 32. PT harus menyediakan prasarana untuk yang berkebutuhan khusus.

### SARANA

1. **Kecukupan, Aksesibilitas, dan Mutu Sarana:** Kecukupan sarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, kesiap pakaian mencakup: fasilitas dan peralatan untuk Proses Belajar Mengajar (PBM), Penelitian, dan PkM. Mengacu kepada SN DIKTI Pasal 32. PT harus menyediakan sarana untuk yang berkebutuhan khusus.
2. **Kecukupan, Aksesibilitas dan Mutu Sistem informasi:** Ketersediaan sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk:
  - a) mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan dan terjaga kerahasiaanya.
  - b) mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan. (Misal: SIMPT, SIM Perpustakaan, Database, dan Sistem Informasi PBM).

## 6. PENDIDIKAN

### KURIKULUM

1. Ketersediaan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan para pemangku kepentingan.
2. Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum yang memuat:
  - Profil lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu kepada KKNi dan peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini (seperti pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi) sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan,
  - Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum.
3. Ketersediaan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.

### PEMBELAJARAN

1. Ketersediaan bukti yang sah tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.
2. Ketersediaan bukti yang sah tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran.
3. Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran.
4. Analisis data tentang pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik dan praktik lapangan yang diselenggarakan untuk pembentukan kompetensi mahasiswa program studi (**Tabel 2.c LKPT**). Data dan analisis disampaikan oleh pengusul dari perguruan tinggi vokasi.

## PENDIDIKAN

### INTEGRASI KEGIATAN PENELITIAN DAN PkM DALAM PEMBELAJARAN

1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran
2. Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
3. Ketersediaan bukti yang sah SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran.

### SUASANA AKADEMIK

1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
2. Ketersediaan bukti sah tentang terbangunnya suasana akademik yang kondusif dan dapat berupa:
  - a) Keterlaksanaan interaksi akademik antar sivitas akademika dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan PkM baik pada skala lokal/nasional/ internasional,
  - b) Keterlaksanaan program/kegiatan non akademik yang melibatkan seluruh warga kampus yang didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan dana yang memadai.
3. Ketersediaan bukti yang sah tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik.

## 7. PENELITIAN

- Ketersediaan: dokumen formal Renstra Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan Renstra Penelitian, pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya, bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup tatacara penilaian dan *review*, legalitas pengangkatan *reviewer*, bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian, dokumentasi pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, dan keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional.

## 8. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- Ketersediaan: dokumen formal Renstra PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan Renstra PkM, pedoman PkM dan bukti sosialisasinya, bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM mencakup tatacara penilaian dan *review*, legalitas pengangkatan *reviewer*, bukti tertulis hasil penilaian usul PkM, legalitas penugasan pengabdikan/kerjasama PkM, berita acara hasil *movev*, serta dokumentasi luaran PkM. Dokumentasi pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada pimpinan PT dan mitra/pemberi dana.

## 9. LUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA

### PENDIDIKAN

Keberadaan dan implementasi sistem yang menghasilkan data luaran dan capaian pendidikan yang sah dan paling tidak mencakup:

- Capaian pembelajaran yang diukur melalui Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan (**Tabel 5.a.1 LKPT**).
- Pengakuan kompetensi lulusan melalui sertifikasi kompetensi/profesi/ industri (**Tabel 5.a.2 LKPT**). Data dan analisis disampaikan oleh pengusul dari perguruan tinggi vokasi.
- Prestasi akademik mahasiswa (**Tabel 5.b.1 LKPT**) dan prestasi non-akademik mahasiswa (**Tabel 5.b.2 LKPT**).
- Efektivitas dan produktivitas pendidikan (**Tabel 5.c.1, Tabel 5.c.2 a s.d. h LKPT**).
- Daya saing lulusan (**Tabel 5.d.1 dan Tabel 5.d.2 LKPT**).
- Kinerja lulusan (**Tabel 5.e.1 dan Tabel 5.e.2 LKPT**).

yang dikumpulkan, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

## 9. LUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA

### PENELITIAN DAN PkM

Berisi data publikasi, sitasi dan luaran penelitian maupun PkM yang sah, dikumpulkan, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

- Publikasi Ilmiah (Tabel 5.f LKPT).
- Sitasi Karya Ilmiah (Tabel 5.g LKPT). Data dan analisis disampaikan oleh pengusul dari perguruan tinggi akademik.
- Produk/Jasa yang Diadopsi oleh Industri/Masyarakat (Tabel 5.g LKPT). Data dan analisis disampaikan oleh pengusul dari perguruan tinggi vokasi.
- Luaran Lainnya (Tabel 5.h LKPT).

# ANALISIS DAN PENETAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN INSTITUSI

## Analisis capaian kinerja

- Cakupan aspek antar kriteria yang dievaluasi: kelengkapan, keluasan, kedalaman, ketepatan, dan ketajaman analisis untuk mengidentifikasi akar masalah yang didukung oleh data/informasi yang andal dan memadai serta konsisten dengan hasil analisis yang disampaikan pada setiap kriteria.

## Analisis SWOT atau analisis lain yang relevan

- Ketepatan mengidentifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi serta keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja. Analisis SWOT harus mencakup strategi pengembangan.

## Strategi pengembangan

- Kemampuan institusi dalam menetapkan prioritas pengembangan sesuai dengan kapasitas, kebutuhan, dan rencana strategi pengembangan institusi secara keseluruhan.

## Program Keberlanjutan

- Mekanisme penjaminan keberlangsungan program dan *good practices* yang dihasilkan, serta jaminan ketersediaan sumberdaya untuk mendukung pelaksanaan program termasuk rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan.

# LAPORAN KINERJA PERGURUAN TINGGI (LKPT)

## ISI LKPT

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

HALAMAN MUKA

IDENTITAS PERGURUAN TINGGI

IDENTITAS TIM PENYUSUN

BORANG INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA
2. MAHASISWA
3. SUMBER DAYA MANUSIA
4. KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA
5. LUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA

## DAFTAR TABEL DALAM LKPT

No	Nomor dan Judul Tabel	Nama Sheet
1	Tabel 1.a Sertifikasi/Akreditasi Eksternal dan Audit Keuangan Eksternal	1a
2	Tabel 1.b Akreditasi Program Studi	1b
3	Tabel 1.c Kerjasama Perguruan Tinggi	1c
4	Tabel 2.a Seleksi Mahasiswa Baru	2a
5	Tabel 2.b Mahasiswa Asing	2b
6	Tabel 3.a.1) Kecukupan Dosen Perguruan Tinggi	3a1
7	Tabel 3.a.2) Jabatan Akademik Dosen Tetap	3a2
8	Tabel 3.a.3) Sertifikasi Dosen (Pendidik Profesional/Profesi/Industri/Kompetensi)	3a3
9	Tabel 3.a.4) Dosen Tidak Tetap	3a4
10	Tabel 3.b Rasio Dosen terhadap Mahasiswa	3b
11	Tabel 3.c.1) Produktivitas Penelitian Dosen	3c1
12	Tabel 3.c.2) Produktivitas PkM Dosen	3c2
13	Tabel 3.d Rekognisi Dosen	3d
14	Tabel 4.a Perolehan Dana	4a
15	Tabel 4.b Penggunaan Dana	4b
16	Tabel 5.a.1) Indeks Prestasi Mahasiswa (IPK)	5a1
17	Tabel 5.b.1) Prestasi Akademik Mahasiswa	5b1
18	Tabel 5.b.2) Prestasi Non-akademik Mahasiswa	5b2
19	Tabel 5.c.1) Lama Studi Mahasiswa	5c1
20	Tabel 5.c.2) Rasio kelulusan tepat waktu dan rasio keberhasilan studi	5c2
21	Tabel referensi untuk penilaian butir 5.d.1), 5.d.2) dan 5.e.2)	Ref 5d1d2e2
22	Tabel 5.d.1) Waktu Tunggu Lulusan	5d1
23	Tabel 5.d.2) Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan	5d2
24	Tabel referensi untuk penilaian butir 5.e.1)	Ref 5e1
25	Tabel 5.e.1) Kepuasan Pengguna Lulusan	5e1
26	Tabel 5.e.2) Tempat Kerja Lulusan	5e2
27	Tabel 5.f Publikasi Ilmiah	5f
28	Tabel 5.g Sitasi Karya Ilmiah	5g
29	Tabel 5.h Luaran Lainnya	5h

## REFERENSI

1. Basaruddin, Chan, "Implementasi Akreditasi Pendidikan Tinggi Indonesia – Harapan dan Tantangan". BAN-PT. 2018.
2. Buchori, Imam, "Kebijakan Instrumen Akreditasi BAN-PT berbasis SN Dikti". BAN-PT. 2018.
3. Dewan Eksekutif BAN-PT, "Perkembangan Terkini Akreditasi Perguruan Tinggi". BAN-PT. 2018.
4. BAN-PT, "Peraturan BAN-PT No. 4 tahun 2017 tentang instrument akreditasi".
5. BAN-PT, "Peraturan BAN-PT No. 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi".
6. Nirwan, Saepudin, "Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0 Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LKPT)". BAN-PT. 2018

## TERIMA KASIH